

**ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK OLEH ARAB SAUDI
TERHADAP QATAR TAHUN 2017 DITINJAU DARI PERSPEKTIF**

REALISME

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMAD ROBI HAMDANI

14323004

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK OLEH ARAB SAUDI

TERHADAP QATAR TAHUN 2017 DITINJAU DARI PERSPEKTIF

REALISME

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMAD ROBI HAMDANI

14323004

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Pemutusan Hubungan Diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Qatar Tahun 2017 Ditinjau dari Perspektif *Realisme*

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

18 Agustus 2021

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia


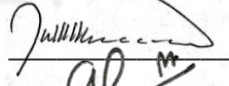
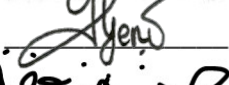
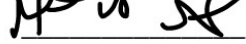
Ketua Program Studi


Hangga Fathana, S.IP., B.Int St.,M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Muhammad Zulfikar Rahmat, B.A., M.A., Ph.D.
2. Willi Ashadi, S.H.I., M.A.
3. Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.
4. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhamad Robi Hamdani
No. Mahasiswa : 14323004
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Analisis Pemutusan Hubungan Diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Qatar Tahun 2017 Ditinjau dari Perspektif *Realisme*.

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 18 Agustus 2021

Yang menyatakan



Muhamad Robi Hamdani

HALAMAN MOTO

DEEN OVER DUNYA. – Robi

EVERYONE HAS THEIR OWN BATTLE. – Karinaudewi

WISE PERSON IS THINKING, NOT JUST FOLLOWING. – Robi

*IN GOD YOU TRUST, BECAUSE EVEN YOUR SHADOW WOULD
LEAVE YOU IN THE DARKNESS.* – Ibn Taimiyah

LIVE AS SPECIES, NOT AS INDIVIDUAL. – Dr. Brand

PRAKATA



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala puji bagi Allah, Tuhan bagi semesta Alam yang telah memberikan kemudahan bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini, tak lupa sholawat beriringan salam selalu tucurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zama kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Sebuah kesyukuran bagi saya selaku peneliti, karena atas rahmat dan hidayah Allah akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan. Saya menyadari bahwa dalam proses menyelesaikan penelitian ini, telah banyak pihak-pihak yang turut membantu saya dan oleh karena itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih kepada:

1. Ayah Sudirman Herry dan Ibu Ellyda yang telah memberikan support secara moril dan materil selama ini, dari Padang, Lampung, Jakarta, Bandung, Jogjakarta, yang tak kenal lelah dan berkeluh-kesah. Wallahi, uhibukkum fillah, fiddunya wal akhirah ya usroti. Alhamdulillah.
2. Kedua kakak perempuan saya, Rika dan Lisa, serta suaminya yang sangat sibuk sekali. Haha

3. Khususnya seluruh dosen **Hubungan Internasional** UII yang Wallahi sangat saya hormati; *Ustad Willi, Pak Fikar, Pak Jati, Pak Hangga, Pak Enggar, Bung Gera, Pak Hasbi, Pak Hadza, Bu Een, Miss Karin, Bu Masitoh dan Mba Diah* pastinya. Serta dosen – dosen cross-jurusan dan fakultas yang juga mengajar di HI UII. Yang tak bisa saya sebutkan gelarnya satu persatu. Dan walaupun bangga saja tidak cukup, bagaimanapun saya wajib bangga dan sangat bersyukur pernah menjadi mahasiswa-mu pak, buk. Terimakasih telah bersabar, berjuang dan mengajarkan saya banyak hal. Semoga ini semua diberkahi dan dirahmati Allah Swt. Long Live **Hubungan Internasional** UII!
4. *Ustad Willi* dan *Bu Een* selaku Penguji skripsi. Serta *Pak Fikar* selaku dosen pembimbing yang sangat sabar. Terimakasih telah mengenalkan saya tentang Qatar dan Arab Saudi. Syukran katsiran ‘ala kuli hal!
5. *Pak Widi* dosen *Psikologi* UII dan *Mba Astina* alumni *Mapro* UII. God sents both of YOU. Berkat pertolongan dan keridhoan Allah Swt, terimakasih atas program pendampingannya pak, mba!
6. Seluruh anggota Lembaga Dakwah *JAFANA FPSB* UII 15, 16, 17, wabil khusus; *hafiz, hanipah, ratre, nuqi, ajeng, canda*, makasih ya udah bikin saya jadi anak psikologi jadi – jadian. Brothers and sisters fillah pokonya!
7. Mas Antor *FIAI* UII, Mas Samsul *FIAI* UII, senior *Asrama Man 1* dan *Asrama UII*. Wallahi, Mumtazunal ahbab!
8. Semua Anak **Hubungan Internasional** UII angkatan 14, 15, 16, 17 yang tak dapat saya sebutkan satu persatu karena MashaAllah hampir semuanya kenal. Stay positive, stay alive, see you on Top comrades!

9. Wabil khusus sohib gunung dan hijrah saya; *bunggera, panjul, latep, galang, dayat, bagir, bowor, bayoe, endo, reksi* hahahaha cuma bisa ketawa aja saya.
10. Seluruh anggota *UMC UII* dan Kos Saung Jati.
11. Seluruh anak *Asrama Putra Man 1 Bandar Lampung* dan *SMAN 10 Bandung* yang telah mewarnai hidup saya.
12. Teruntuk Masjid *ULIL AL BAB, UII JOGJAKARTA*, Thanks for everything!
13. Kopi Klotok, Kopi Merapi.
14. And ofcourse to myself.



DAFTAR SINGKATAN

GCC	: <i>Gulf Cooperation Council</i>
QNA	: <i>Qatar News Agency</i>
LNG	: <i>Liquid Natural Gas</i>
GCC	: <i>Gulf Cooperation Council</i>
CASOC	: <i>California Arabian Standard Oil Company</i>
ARAMCO	: <i>Arabian American Oil Company</i>
FSA	: <i>Free Syrian Army</i>
UAE	: <i>Uni Emirate Arab</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa - Bangsa</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	ii
HALAMAN MOTO	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Signifikansi.....	5
1.5 Cakupan Penelitian.....	7
1.6 Tinjauan Pustaka	7
1.7 Landasan Teori	12
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.8.1 Metode Kualitatif.....	15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	16
1.8.3 Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.9 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LATAR BELAKANG PEMUTUSAN DIPLOMATIK QATAR OLEH ARAB SAUDI TAHUN 2017	18
2.1 Posisi Arab Saudi Di Timur Tengah	18
2.2 Dinamika Konflik Arab Saudi dan Qatar	21

2.3 Keputusan Diplomatik Qatar	26
2.4 Dampak Keputusan Diplomatik.....	29
BAB III FAKTOR KEPUTUSAN DIPLOMATIK QATAR OLEH ARAB SAUDI TAHUN 2017	31
3.1 Dukungan Regional dan Amerika	32
3.2 Hubungan Qatar dengan Ikhwanul Muslimin	34
3.3 Kekhawatiran terhadap media Aljazeera.....	37
3.4 Posisi Qatar di tengah Arab Saudi dan Iran.....	42
BAB IV KESIMPULAN	48
4.1 Rangkuman.....	48
DAFTAR PUSTAKA	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	27
Gambar 2	30



ABSTRAK

Secara historis, Qatar dan Arab Saudi memiliki hubungan yang fluktuatif sejak kepemimpinan Qatar diganti oleh seorang pangeran muda pada tahun 1995. Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani menggantikan ayahnya sebagai Emir baru dan membawa Qatar dengan pendekatan yang lebih seimbang terhadap aktor negara maupun non-negara di Timur Tengah. Berbeda dengan ayahnya yang lebih pro terhadap Arab Saudi, pangeran yang baru ini cenderung memiliki keberpihakan terhadap Iran dan *Ikhwanul Muslimin*, serta pemembentukan media *Aljazeera* sebagai pembaharuan sudut pandang Islam bagi bangsa Arab di kawasan. Inilah yang kemudian menjadi penyebab eskalasi hubungan kedua negara yang berujung pada pemutusan diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Qatar pada tahun 2017. Maka, berdasarkan perspektif *Realisme*, penelitian ini mengidentifikasi Arab Saudi dengan konsep *State-Centric*, *National Interest* dan *International Structure*, bahwasannya dunia yang Anarki mendorong Arab Saudi untuk menekan Qatar yang memiliki hubungan baik dengan Iran, serta afiliasinya dengan *Ikhwanul Muslimin*, dalam rangka mempertahankan Hegemoni dan pengaruhnya di Timur Tengah.

Kata Kunci: Arab Saudi, Qatar, *Realisme*, Hegemoni, Anarki

ABSTRACT

Historically, Qatar and Saudi Arabia have had a volatile relationship since Qatar's leadership was replaced by a young prince in 1995. Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani adopted his father as the new Emir and brought Qatar with a more balanced approach to state and non-state actors in the middle East. With his father being more pro-Saudi Arabia, the new prince tends to take sides with Iran and the *Muslim Brotherhood*, as well as the establishment of the *Al Jazeera* media as a different point of view of Islam for Arabs in the region. This is the escalation of the relationship between the two countries which was then carried out by Saudi Arabia in 2017. So, based on the *Realism* perspective, this study identifies Saudi Arabia with the concept of *State-Centric*, *National Interest* and *International Structure*, that an anarchic world encourages Saudi Arabia to put pressure on Qatar, which has good relations with Iran, as well as with the *Muslim Brotherhood*, in order to maintain its hegemony and influence in the Middle East.

Keywords: Saudi Arabia, Qatar, *Realism*, Hegemony, Anarchy

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemutusan Hubungan bilateral antara dua Negara pada umumnya sangat mungkin terjadi. Dalam studi Hubungan Internasional keputusan ini biasanya digunakan sebagai alternatif terakhir atas problematika antara dua Negara yang bersangkutan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan putusnya hubungan diplomatik antara lain seperti kepentingan nasional, konflik, sengketa bahkan kebijakan suatu negara yang bertentangan atau berseberangan dengan negara lain. Demikian hal ini yang sedang terjadi pada krisis diplomatik Arab Saudi dengan Qatar, dimana Arab Saudi memutus hubungan diplomasi dengan Qatar, sebagaimana dilatarbelakangi beberapa faktor yang dipaparkan di atas.

Layaknya ASEAN dan EU dibentuk, GCC (*Gulf Cooperation Council*) adalah sebuah organisasi antar-pemerintah yang terdiri dari enam negara anggota di kawasan timur tengah, yang beranggotakan Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain dan Oman. GCC ditandatangani pada tanggal 11 November 1981 di Abu Dhabi dengan kantor pusat yang terletak di Riyadh, dan diketuai oleh Arab Saudi. Dengan kesamaan latar belakang budaya dan agama, GCC dibentuk bertujuan menyatukan dan mempererat hubungan antar negara teluk dengan kerjasama pada tiap - tiap sektor yang disepakati (Aljazeera, 2017).

Dari sisi historis, Arab Saudi dan Qatar memiliki hubungan yang baik. Hanya saja, pada masa kepemimpinan Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani tahun

1995, hubungan Qatar dengan negara-negara teluk termasuk Arab Saudi mulai mengalami gejolak. Beberapa kebijakan luar negeri Qatar banyak dinilai berseberangan dengan Arab Saudi dan dengan negara teluk lainnya (Ulrichsen, 2014). Perseteruan antara Arab Saudi dan Qatar mulai muncul tahun 2011, mana kala keduanya berdiri dibelakang dua kubu yang saling berseberangan dalam musim semi Arab (*Arab Spring*). Qatar menjadi salah satu Negara yang muncul dengan kepemimpinan yang revolusionis, sementara Arab Saudi masih tetap mempertahankan tradisional monarki yang turun - temurun dari kepemimpinan sebelumnya (Kausch, 2015).

Sebagai contoh, yaitu dalam kasus Mesir, Qatar memberikan dukungan kepada Ikhwanul Muslimin (organisasi terorisme) sedangkan Arab Saudi ada dibelakang kelompok militer pengganti Hosni Mubarak. Dukungan Qatar terhadap *Ikhwanul Muslimin* dan beberapa kelompok separatis lainnya, membuat Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya khawatir. Perseteruan akibat perbedaan dukungan dalam Musim Semi Arab ini berujung pada pembekuan hubungan diplomatik antara Qatar dan Arab Saudi di awal tahun 2014. Adanya perbedaan visi di kedua negara menjadi salah satu pemicu memanasnya hubungan tersebut (Wintour, 2017).

Namun, konflik ini pada akhirnya menemukan solusi jangka pendek yaitu dengan cara negosiasi dan sepakat untuk menormalisasi hubungan diplomatik mereka sebagai komitmen untuk pembangunan aliansi negara-negara Timur Tengah atau disebut dengan GCC (Gulf Cooperation Council). Bentuk upaya lain yang dilakukan Qatar juga ditunjukkan dengan mengeluarkan beberapa orang *Ikhwanul Muslimin* dari negara mereka. Diharapkan dengan upaya tersebut, Qatar

dapat menjalin kembali hubungan yang baik dengan Arab Saudi dan negara Teluk lainnya (Ulrichsen, 2014, pp. 19-22).

Normalisasi hubungan tersebut tidak berlangsung lama. Awal tahun 2017, hubungan Arab Saudi dan Qatar kembali memburuk dan mengalami ketegangan. Arab Saudi kembali memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni 2017. Keputusan ini bukan tanpa alasan, pasalnya tidak hanya Arab Saudi tetapi negara-negara teluk lainnya seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Libya, juga ikut memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Hal ini merujuk pada penentangan atas kegiatan diplomatik yang dilakukan Qatar di Timur Tengah (BBC, 2017).

Beberapa alasan yang dilontarkan oleh Riyadh mengenai pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar ialah dugaan bahwa Qatar ternyata masih mendukung gerakan-gerakan terorisme seperti *Ikhwanul Muslimin*, ISIS, kelompok Hamas dan kelompok radikal lainnya. Adapun bentuk dukungan yang diberikan Qatar terhadap organisasi terorisme tersebut adalah dengan memberikan dukungan finansial berupa aliran dana untuk pembelian senjata (Keatinge, 2017). Selain itu, Qatar juga dianggap terlalu mencampuri urusan internal negara-negara tetangga anggota GCC. Seperti halnya, perang yang terjadi di Tunisia, Yaman, Suriah, dan Mesir. Pemicu lainnya berasal dari kemarahan Arab Saudi terhadap berita yang dipublikasikan oleh media QNA *Qatar News Agency* dimana pemimpin Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menyatakan dukungannya untuk Iran dengan menyatakan bahwa "Iran mewakili kekuatan regional dan Islam yang tidak dapat diabaikan dan tidak bijaksana untuk melawannya dan Iran merupakan kekuatan besar dalam stabilitas kawasan ini". Bagaimanapun pihak

Qatar sudah membantah bahwa hal tersebut adalah bohong, dan mengklaim bahwa ada peretas media yang sengaja untuk menabur perselisihan negara-negara Teluk (Aljazeera, 2018).

Setelah pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan Arab Saudi terhadap Qatar, pada 6 Juni 2017 dilaporkan bahwa Arab Saudi telah mengeluarkan daftar tuntutan yang harus dipatuhi Qatar untuk mengakhiri krisis besar. Adapun beberapa tuntutan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi, diantaranya adalah: Menurunkan hubungan diplomatik dengan Iran dan menutup misi diplomatik Iran di Qatar, mengusir anggota Garda Revolusi Iran dan memutuskan kerja sama militer dan intelijen dengan Iran. Perdagangan dengan Iran harus mematuhi sanksi Amerika dan Internasional dengan cara yang tidak membahayakan keamanan Dewan Kerjasama Teluk. Menutup media *Aljazeera*, serta semua media lain yang dibiayai oleh Qatar. Segera menutup pangkalan militer Turki yang saat ini sedang dibangun, dan menghentikan kerja sama militer dengan Turki di dalam Qatar. Memutuskan ikatan dengan semua "organisasi teroris", khususnya *Ikhwatul Muslimin*, ISIS, Al-Qaeda, Fateh Al-Sham (sebelumnya dikenal sebagai Front Nusra) dan Hizbullah Lebanon. Nama - nama tersebut telah resmi dinyatakan sebagai kelompok teroris sesuai daftar yang diumumkan oleh Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Mesir, untuk kemudian setuju dengan semua pembaruan daftar ini di masa depan. Tuntutan tersebut harus dipenuhi dalam waktu 10 hari, dan pada kenyataannya Qatar merespon negatif tuntutan tersebut yang dinilai tidak realistis dan tidak bisa dilakukan. Konflik semakin bereskalasi ketika Arab Saudi mengeluarkan kebijakan yang dinilai

melanggar hukum internasional yaitu memblokade Qatar meliputi jalur laut, darat dan udara (BBC, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka riset yang penulis ingin tulis adalah “Mengapa Arab Saudi memutuskan hubungan diplomasi dengan Qatar pada tahun 2017?”

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui kepentingan Arab Saudi dalam mengeluarkan kebijakan pemutusan diplomasi dengan Qatar, dengan melihat 13 daftar tuntutan yang diajukan terhadap Qatar yang kemudian menjadi **alasan** utama Arab Saudi mengambil kebijakan pemutusan diplomatik tersebut.

1.4 Signifikansi

Dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat fenomena konflik bilateral yang terjadi antara Arab Saudi dan Qatar. Arab Saudi dan Qatar adalah kedua negara yang secara garis besar memiliki kesamaan budaya dan agama. Arab Saudi adalah negara terkaya diantara negara – negara saudaranya. Qatar juga dapat dilihat sebagai salah satu negara terkaya di dunia, pasalnya secara geografis Qatar jauh lebih kecil dibandingkan Arab Saudi namun memiliki sumber daya yang melimpah seperti minyak dan gas LNG (*Liquid Natural Gas*) yang dikelola secara bersama dengan Iran (Haretz, 2017).

Hubungan kedua negara memang terjalin sejak lama, namun tidak menutup kemungkinan adanya konflik diantaranya. Hal tersebut sedang dialami oleh Arab Saudi dan Qatar yang tergolong memanas, dimana Arab Saudi menganggap Qatar telah mendanai beberapa organisasi atau kelompok teroris seperti *Ikhwanul Muslim*, Hamas dan kelompok lainnya. Kedekatan Qatar dengan Iran juga menjadi penyebab retaknya hubungan Arab Saudi dengan Qatar, karena rivalitas Arab Saudi dengan Iran sangat nyata di Timur Tengah.

Hubungan kedua negara ini semakin memanas ketika Arab Saudi dan sekutunya seperti Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memblokade jalur darat, laut dan udara, juga meminta warga negara Qatar untuk meninggalkan negara - negara tersebut. Disamping itu Arab Saudi juga memberi 13 tuntutan yang harus dipenuhi Qatar, diantaranya agar Qatar berhenti mendanai organisasi teroris dan mengurangi hubungan dengan Iran, menutup pangkalan militer Turki di Qatar, berhenti bekerjasama dengan teroris, menyerahkan daftar nama orang yang telah diajukan, penutupan *Al Jazeera* dan lain lain. Namun hal ini justru mendapat respon negatif dari pihak Qatar, menteri luar negeri Qatar yakni Sheikh Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, menggambarkan pemutusan semua hubungan yang dialami negaranya sama halnya dengan pelanggaran dan penghinaan, juga melanggar kedaulatan negaranya. Oleh karena itu, penelitian pada skripsi ini penting untuk memahami situasi sebelum dan sesudah pemutusan diplomatik Qatar oleh Arab Saudi, untuk menganalisa apa yang sebenarnya menjadi kepentingan Arab Saudi.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini mencakup dinamika hubungan Arab Saudi dan Qatar sebelum dan sesudah keputusan diplomatik tahun 2017, serta beberapa aspek penting yang menyebabkan eskalasi hubungan antara Arab Saudi dan Qatar semakin memanas dengan menyinggung hubungan atau keterlibatan Iran dan beberapa aktor *non-state*, yang berafiliasi dengan negara – negara tersebut, baik secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika konflik di Timur Tengah dengan perspektif *Realisme*. Penelitian ini juga akan melihat sebagian dampak keputusan hubungan diplomatik dengan Qatar.

1.6 Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian sebelumnya merupakan kajian yang sangat penting bagi sebuah penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya dibutuhkan oleh penulis sebagai pedoman dalam mengerjakan skripsi sehingga penulis setidaknya memiliki acuan untuk memudahkan proses penelitiannya. Selain itu penelitian-penelitian sebelumnya juga berfungsi sebagai pembandingan antara penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya dengan penelitian yang akan dicari untuk mencari perbedaan-perbedaan yang mendasar. Adapun penelitian sebelumnya yang relevan dengan skripsi penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Imad K. Harb yang berjudul “*Why Qatar? Explaining Contention Issue*” yang diwadahkan ke dalam buku berjudul *Crisis In The Gulf Cooperation Council (Challenge and Prospect)*. Pada penelitiannya Imad lebih menitik-beratkan rentannya kerjasama yang terjadi di antara negara Teluk, terlebih setelah adanya fenomena *Arab Spring* yang

membuat negara-negara teluk menjadi resah akan posisi masing-masing negara. Faktor inilah yang kemudian menjadi titik tumpu dari pemutusan hubungan diplomatik tersebut. Organisasi dan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara Teluk yang tidak didasarkan pada visi dan misi yang kuat, membuat beberapa faktor eksternal mudah masuk dan mengintervensi kebijakan – kebijakan yang sebelumnya sudah disepakati oleh negara-negara Teluk, begitupun intervensi barat terutama Amerika Serikat yang banyak dibahas pada bagian akhir penelitian ini (Harb, 2017).

Kedua, dalam tulisan yang berjudul *Qatar And The Arab Spring: Policy Drivers and Regional Implications* yang ditulis oleh Kristian Coates Ulrichsen. Coates menjelaskan bahwa krisis Qatar terjadi karena persaingan golongan diantara negara-negara di Teluk Arab pasca *Arab Spring*. Krisis diplomatik ini terjadi karena pecahnya golongan aliansi, golongan sunni di Teluk Arab. Rasa ketidakpercayaan dan persaingan antar golongan serta visi misi yang tidak kuat membuat konflik ini kian memanas. Dalam penelitian ini unit yang diteliti adalah unit analisis regional yaitu GCC (Gulf Cooperation Council). Perbedaan pertama yang tampak adalah bagian unit analisis tersebut, dimana penelitian ini hanya berfokus pada unit analisis negara antara Qatar dan Arab Saudi. Pemilihan negara Arab Saudi juga dilatarbelakangi pada kenyataan bahwa Arab Saudi merupakan pemimpin negara Timur Tengah hingga saat ini, sementara saudaranya Qatar sebagai negara kecil muncul ke permukaan dengan paham yang berbeda terkait Islam yang lebih modern yang dipengaruhi oleh Yusuf Al Qaradawi dengan gerakan politiknya *Ikhwanul Muslimin* (Ulrichsen, 2014).

Ketiga, dalam jurnal yang berjudul *Rivalitas Saudi-Qatar dan Skenario Krisis Teluk* yang ditulis oleh Broto Wardoyo. Dalam tulisannya ia menjelaskan sejarah panjang ketegangan yang dialami Qatar dan Arab Saudi, dan penulis membagi menjadi tiga fase yang berbeda. Pertama, sebelum dan selama tahun 1990-an, menjelaskan bahwa persaingan mereka adalah sebagian besar berpusat pada sengketa perbatasan. Kedua, ditahun 2000-an, politik hidrokarbon memainkan peran dan berkaitan dengan perselisihan perbatasan sebagai masalah utamanya. Ketiga, fase di tahun 2010an, perselisihan berkisar pada dominasi regional. Kurangnya visi dan misi yang kuat dan perbedaan pendapat diantara negara-negara Teluk membuat mereka rentan terhadap masalah yang muncul, terutama ketika fenomena Arab Spring muncul, seperti yang terjadi di Mesir. Dukungan Qatar terhadap *Ikhwanul Muslimin* dan beberapa kelompok lain yang seja ini membuat Arab Saudi dan beberapa negara Teluk meradang mengingat negara-negara ini mengklasifikasikan *Ikhwanul Muslimin*, serta kelompok-kelompok lain sebagai kelompok teror. Uni Emirat Arab, misalnya, memutuskan menghukum warga negara Qatar yang diketahui terlibat dalam kelompok al-Islah, yang disebut sebagai bagian dari Ikhwanul Muslimin di negara tersebut, pada bulan Maret 2014. Perseteruan akibat perbedaan dukungan politik dalam *Arab Spring* ini berujung pada pembekuan hubungan diplomatik antara Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain dengan Qatar. Pada bulan November 2014, ketiga negara tersebut sepakat menormalisasi hubungan diplomatik mereka dengan Qatar setelah dimediasi oleh Kuwait. Normalisasi hubungan tersebut tidak berlangsung lama. Tahun 2016, setelah munculnya beberapa insiden yang membuka kembali tabir atas dukungan Qatar kepada beberapa kelompok yang dipandang oleh Saudi,

Uni Emirat Arab, dan Bahrain serta Mesir sebagai kelompok teror, termasuk perubahan afiliasi Hamas dari Riyadh ke Doha, hubungan diplomatik antara Qatar dengan negara-negara tersebut kembali memburuk. Akhirnya, tanggal 5 Juni 2017, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar karena tiga alasan: dukungan Qatar terhadap kelompok-kelompok teror, dukungan Qatar terhadap al-Jazeera, dan dukungan Qatar terhadap Iran. Penulis juga menyebutkan bahwa Iran memainkan peran yang berpengaruh dalam persaingan antara Arab Saudi dan Qatar. Oleh karena itu keseimbangan kekuatan politik antara Arab Saudi dan Iran akan menjadi faktor terbesar dalam skenario masa depan krisis ini (Wardoyo, 2018).

Keempat, dalam jurnal yang berjudul *The Qatar Crisis : Cause, Implication, Risks And The Need For Compromise* yang ditulis oleh Philip Gordon. Dalam jurnalnya Philip menjelaskan terkait krisis Qatar yang terjadi di tahun 2017 baik dari sebab, implikasinya, resiko dan kompromi di Timur Tengah. Penulis menyebutkan bahwa ada 4 penyebab terjadinya krisis Qatar. Pertama, pendanaan politik antara pemimpin Arab Saudi yang berbeda dengan Qatar. Aliansi negara-negara teluk dipimpin oleh Arab Saudi, dan negara tersebut merasa tidak aman atas pendanaan yang dilakukan oleh Qatar terhadap *Ikhwanul Muslimin* dan kelompok-kelompok separatis lainnya. Kedua, kedekatan hubungan Qatar dengan Iran. Kedekatan hubungan antara kedua negara tersebut dianggap sebagai ancaman bagi mayoritas negara sunni di teluk. Ketiga, kunjungan presiden Trump di Arab Saudi yang membahas mengenai investasi Amerika Serikat untuk suplai senjata dalam rangka menghalau pergerakan terorisme yang ada di Timur Tengah. Trump mendukung aliansi – aliansi negara teluk untuk

memerangi Iran yang dianggap sebagai ancaman. Keempat, adanya *Arab spring* yang kemudian memberikan iklim baru bagi negara – negara Arab yang sebelumnya secara eksplisit dikomandoi oleh Arab Saudi. Qatar menjadi rival baru bagi Arab Saudi untuk mempertahankan kedudukannya di Timur (Gordon, 2017).

Beberapa literatur di atas memiliki fokus-fokus pembahasan tersendiri. Diantaranya adalah terkait rentannya kerjasama yang terjadi di antara negara Teluk, terlebih setelah adanya fenomena Arab Spring, sejarah panjang hubungan Arab Saudi dan Qatar yang mulai memburuk pada tahun 2011 hingga 2016. Literatur diatas menunjukkan relevansi pembahasan hubungan Arab Saudi dan Qatar. Oleh karenanya penelitian ini akan melengkapi penelitian – penelitian sebelumnya dengan lebih memfokuskan kepada motif kepentingan Saudi Arabia dalam pemutusan diplomasi dengan menyinggung *Ikhwanul Muslimin*, *Aljazeera* dan Iran.

1.7 Landasan Teori

Secara umum teori dipahami sebagai parameter, atau pengukur dalam hal ini adalah sebuah penelitian, tentang sejauh mana Analisa dapat dilakukan dan dimana analisa harus dicukupkan. Sehingga, sebuah penelitian memiliki cakupan dan batasan yang jelas, runtut dan tidak serampangan. Adapun tujuan penggunaan sebuah teori adalah sebuah pencerahaan dalam rangka mencapai kesimpulan sebuah penelitian.

Realisme Klasik

Perspektif ini berkembang dari beberapa pemikiran tokoh – tokoh seperti Niccolo Machiavelli (1469 – 1527), Thomas Hobbes (1588 – 1679) dan Hans Joachim Morgenthau (1904 – 1980). Ketiga tokoh tersebut sangat mewarnai perkembangan perspektif realisme saat ini. Mereka sama – sama melihat bahwa dunia adalah tempat yang anarki. Namun penulis akan sedikit menjelaskan pandangan tokoh – tokoh tersebut dan kemudian menggunakan salah satu konsep khususnya perspektif Realisme Klasik menurut **Hans Joachim Morgenthau**.

Adapun pendapat Machiavelli, ia menyimpulkan bahwa manusia itu memiliki kecenderungan *evil* jahat, dan sikap tersebut bisa terjadi kapan saja, di segala kesempatan. Begitupun dalam kepemimpinan, ia mengimplementasikan bahwa seorang raja harus lebih ditakuti daripada dicintai, karena ketakutan akan mencegah rakyatnya untuk membangkang, dan menjadi seorang pemimpin harus mengedepankan tujuan daripada cara, artinya tujuan adalah harus dicapai dengan cara apapun terlepas itu baik maupun buruk (Rasyidin, 2020, pp. 28-31).

Sama halnya dengan Hobbes, bahwa kehidupan adalah persaingan antar manusia untuk bertahan hidup *survival*, hal ini sangat dipengaruhi oleh sifat dasar manusia *human nature* yang menempatkan manusia pada keadaan alamiah *state of nature* dimana manusia memiliki kecenderungan menciptakan konflik dengan yang lainnya. Adapun kondisi alami tersebut terbagi menjadi 3, *pertama* adalah rasa takut dan keamanan. *Kedua*, ambisi dan kompetisi. *Ketiga*, kehormatan dan keagungan (Rasyidin, 2020, pp. 28-31).

Begitupun dengan Morgenthau, ia memiliki pandangan yang cukup relevan terhadap era modern, dengan konsep bernegara dalam Politik dan Moral. Selain itu, ia juga memahami bahwa manusia selalu menginginkan kekuatan dan kekuasaan. Dalam konteks kenegaraan, politik internasional bahwa segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh negara – negara merupakan usaha untuk mencapai kepentingannya. Morgenthau berpendapat bahwa dalam realisme, tolak ukur moral antara individu dan negara memiliki arti atau letak yang berbeda, karena tujuan (kepentingan) suatu negara dalam dunia internasional adalah bersifat politis dan kompleks, maka output dari kebijakan negara akan selalu cenderung kepada sebuah persaingan, misalnya ekonomi, militer. Artinya, persaingan tersebut tidak akan membuahkan hasil bagi kepentingan politik suatu negara bila mereka terlalu mengedepankan aspek moral (Dugis, 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas, definisi *Realisme* adalah sebuah sudut pandang atau perspektif yang mengedepankan sifat dasar atau alami manusia, tentang kenyataan dan kondisi yang ada di lingkungan. Realisme melihat dunia sebagai tempat yang Anarki, dimana kekuatan adalah tujuan utama bagi suatu negara untuk kemudian dapat bertahan dari kemungkinan gangguan yang terjadi,

dimanapun dan kapanpun. Dalam studi Hubungan Internasional, Realisme juga dipahami sebagai proses identifikasi masalah dengan melihat realitas di suatu kawasan tertentu yang kemudian dipertimbangkan berdasarkan objektivitas, untuk mendukung pengambilan keputusan secara final dalam mengarahkan kebijakan negaranya. Maka tolak-ukur dalam pengambilan keputusan kebijakan suatu negara berdasarkan perspektif realisme adalah rasionalitas dan realitas bukan moral, karena moral akan sangat berseberangan dengan kecenderungan dunia yang anarki, dimana negara didorong oleh kebijakan untuk menciptakan konflik baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pandangan anarki ini menempatkan suatu negara dalam kerjasama yang dibayangi oleh kecurigaan (Rosyidin, 2020).

Berikut konsep realisme menurut **Morgenthau** yang akan diterapkan sebagai kerangka pembahasan oleh penulis:

1. Aktor Internasional; negara sebagai aktor utama dalam politik internasional, hanya *state actor* bukan individu atau organisasi lain.
2. Tujuan Negara; keadaan alamiah suatu negara yang diadopsi dari sifat dasar manusia adalah keamanan dan kekuasaan.
3. Struktur Internasional; Anarki, pengakuan terhadap Lembaga dan Hukum Internasional tidak melebihi hakikat peran suatu negara.

Konsep diatas adalah gambaran bagaimana penulis akan mengidentifikasi dan membangun arah penulisan ini. Sehingga penulis memiliki arahan dan pencerahan yang jelas untuk menemukan alasan – alasan mengapa suatu negara mengambil kebijakan tertentu untuk menekan negara lainnya, seperti yang terjadi

dengan Arab Saudi dan Qatar. Kedua negara sama – sama menganut Islam, dan secara geografis Arab Saudi adalah satu – satunya negara yang memiliki perbatasan darat dengan Qatar. Namun, dalam hal ini Arab Saudi dibayangi oleh rasa cemas dan kecurigaan terhadap Qatar, karena secara historis Qatar memiliki hubungan yang baik dengan Iran. Iran adalah lawan hegemoni Arab Saudi secara universal. Selain itu kerajaan Qatar juga dipengaruhi oleh Islam yang modern dari *Ikhwanul Muslimin*. Walaupun keduanya masih dalam paham Islam yang sama, yakni Sunni.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Kualitatif

Penulisan ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui dan memahami perspektif dan dimensi dari sebuah kehidupan sosial. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka akan dihasilkan sebuah analisis yang dijelaskan dan diuraikan dengan kata - kata. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk membangun sebuah pertanyaan penelitian, misalnya 'Bagaimana' (Green, 2007).

Dengan menggunakan metode kualitatif ini, penulis dapat memaparkan dan menjelaskan suatu objek secara rinci. Hasil dari metode kualitatif ini akan mengarah pada pengembangan konsep, interpretasi, saran solusi atau evaluasi dari isu yang telah dibahas oleh penulis. Pada bagian akhir, penulis akan menyimpulkan hasil dari intisari penelitian ini.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yang akan penulis teliti adalah negara Arab Saudi dan Qatar. Sedangkan objek penelitiannya adalah konflik antara Arab Saudi dan Qatar, yang didalamnya menyinggung aktor – aktor lain seperti Iran, *Ikhwanul Muslimin* dan *Aljazeera*.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengambilan data sekunder, yakni sumber atau data akan didapatkan melalui tinjauan pustaka, dengan melakukan proses pencarian data - data yang telah ada sebelumnya, seperti pengamatan, perbandingan, serta mengutip beberapa referensi yang sudah ada, misalnya buku, data, jurnal, artikel dari internet. Dengan demikian penulis akan melakukan peninjauan secara detail dalam beberapa sumber terpercaya dari internet (Green, 2007, p. 21).

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis akan membagi kedalam empat bab. Pada bab 1. terdapat latar belakang masalah yang menjelaskan sedikit terkait hubungan Arab Saudi dan Qatar, sekaligus memberi informasi tentang awal mula bagaimana konflik terjadi yang berakhir pada pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Qatar. Pada bab 1 penulis juga akan memaparkan terkait teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis penelitian ini.

Pada bab 2, penulis akan menganalisis kedudukan Arab Saudi, kerjasama Arab Saudi dengan Amerika, kerjasama Qatar dengan Iran, dugaan pendanaan organisasi *Ikhwanul Muslimini*, dan salah satu platform media *Aljazeera* yang sangat kontroversial.

Pada bab 3, penulis akan mencoba menganalisa berdasarkan perspektif Realisme. Apa yang sebenarnya menjadi motif Arab Saudi mengambil langkah – langkah tersebut dalam rangka mencapai kepentingan walaupun menyebabkan eskalasi konflik.

Pada bab 4, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil yang telah dipaparkan pada bab - bab sebelumnya. Dengan memberikan penjelasan singkat, tegas dan secara umum, sehingga dapat memberikan gambaran yang gamblang terkait apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam fenomena krisis di Timur Tengah, dalam hal ini Arab Saudi dan Qatar.

BAB II

LATAR BELAKANG PEMUTUSAN DIPLOMATIK QATAR OLEH ARAB SAUDI TAHUN 2017

2.1 Posisi Arab Saudi Di Timur Tengah

Politik Internasional adalah *output* dari kebijakan luar negeri dalam kerjasama antar negara yang sering disebut Hubungan Internasional. Maka, kebijakan luar negeri adalah salah satu instrumen penting dalam hubungan internasional. Kebijakan luar negeri dibuat menyesuaikan kondisi politik, ekonomi dan militer baik secara domestik ataupun eksternal. Sebuah kebijakan dibentuk berdasarkan kepentingan atau tujuan, guna meraih keuntungan timbal-balik dalam segi keamanan dan kesejahteraan (Holsti, 1983).

Yang terjadi di timur tengah adalah salah satu contoh fenomena internasional. Negara sebagai subjek politik internasional, memiliki peranannya masing – masing dalam dinamika perpolitikan suatu kawasan, baik dari segi ekonomi maupun militer, aspek – aspek inilah yang akan menentukan kekuatan suatu negara, sehingga negara tersebut memiliki kedudukan atau posisi tertinggi. Dengan status kedudukan yang tinggi, suatu negara dapat dengan mudah mempengaruhi kondisi perpolitikan suatu wilayah regional yang terdiri dari beberapa negara, yang dalam hal ini disebutkan adalah Arab Saudi.

Pada dasarnya, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Kuwait memiliki banyak kesamaan seperti kawasan gurun pasir, cuaca panas, bahasa arab, makanan, budaya, Islam dan minyak. Negara – negara tersebut tergabung dalam aliansi kerjasama regional yang disebut GCC atau *Gulf*

Cooperation Country, yang didirikan pada Tahun 1981. Negara – negara teluk ini mulai terintegrasi sejak abad 20an dan tergolong baru. Selain negara – negara ini kaya karena sumber daya alamnya, tiap – tiap negara dipimpin oleh seorang Raja yang berbasis sistem pemerintahan monarki. Mereka adalah Al-Thani (Qatar), Al-Saud (Arab Saudi), Al-Nahyan (UAE), Al-Sabah (Kuwait), Al-Said (Oman) dan Al-Khalifa (Bahrain). Dan sampai saat ini masing – masing negara memiliki peraturan dan pengadilan sendiri. Terlepas dari itu, sisi lain yang tampak jelas ialah Saudi Arabia selalu melihat dirinya sebagai pemimpin di antara keenam negara ini (Galeeva, 2018).

Arab Saudi adalah negara terbesar secara geografis dan paling kaya-minyak. Memiliki tingkat populasi-tinggi, dan sangat dikenal oleh mancanegara, khususnya bagi umat muslim dunia, juga karena kota Makkah dan Madinah tentunya. Dilihat dari sejarah pendiriannya, Muhammad Bin Abdul Wahhab dan Muhammad Bin Saud adalah *pioneer* yang memiliki peran penting dan signifikan dalam usaha pembentukan negara Saudi. Mereka menganut golongan Islam Sunni dengan paham *Wahabi*; Islam murni. Misi ini dilanjutkan oleh Abdul Aziz putra dari Saud hingga pada level ekspansi wilayah dari dataran Najd sampai ke semenanjung arab, serta Makkah dan Madinah. Walaupun sempat mengalami keruntuhan karena kalah perang dengan Kekaisaran Ottoman, Arab Saudi berdiri kembali ditangan Abdul Aziz muda pada tahapan yang lebih maju, dengan koalisinya Inggris. Bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia I, yang menjadikan kekalahan bagi Kekaisaran Ottoman sekaligus kemenangan bagi Arab Saudi. Setelah cukup lama bekerjasama dengan Inggris, pada tanggal 23

september 1932 Arab Saudi mendeklarasikan kemerdekaannya dan menjadi kerajaan secara resmi (Saudiembassy, 2021).

Selanjutnya, eksistensi Arab Saudi ditandai dengan beberapa peristiwa penting seperti, revolusi Iran, perang Iraq – Iran, konflik di Suriah dan Yaman, dimana Arab Saudi terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peristiwa tersebut diikuti dengan dukungan Rusia terhadap blok Iran, dan Amerika – Israel pada blok Arab. Rivalitas Arab – Iran berlangsung cukup lama hingga hari ini. Disisi lain Arab Saudi juga memiliki hubungan yang cukup signifikan walaupun sempat naik-turun dengan Amerika Serikat. Kerjasama antara Arab Saudi dan Amerika Serikat telah lama terbentuk sejak tahun 1933, seperti kerjasama ekonomi minyak dan gas. Kedua negara ini menyepakati kerjasama pengelolaan minyak dengan nama perusahaan California Arabian Standard Oil Company (CASOC), kemudian pada tahun 1944 diubah menjadi Arabian American Oil Company (ARAMCO) dan pada tahun 1980 Arab Saudi membeli semua saham dan Aramco sepenuhnya milik Arab Saudi (Aramco, 2021).

2.2 Dinamika Konflik Arab Saudi dan Qatar

Ketegangan terjadi ketika Qatar mendeklarasikan kemerdekaan dari Inggris. Setelah resmi menjadi negara, Qatar dan Arab Saudi memiliki sengketa perbatasan yang berkepanjangan yang baru diselesaikan pada tahun 2001. Jika ditinjau ke belakang, pada bulan Ramadhan 14 Februari tahun 1996 Qatar mendapati usaha kudeta dimana Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir terlibat dalam aksi tersebut. Usaha kudeta ini telah direncanakan secara sistematis dan bekerjasama dengan orang dalam dari Qatar, yakni Syekh Hamad bin Jassem Bin Hamad Al Thani yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kepolisian dan juga keponakan Emir Qatar itu sendiri. Ia kemudian bekerjasama dalam sebuah komite kudeta tersebut dengan Sheikh Mohammed Bin Zayed sebagai kepala militer dari UAE, Raja Bahrain Hamad Bin Isa, Menteri Pertahanan Sultan Bin Abdul Aziz dari Arab Saudi dan Omar Suleiman kepala intelijen Mesir (Aljazeera, 2018). Usaha lain yang dilakukan oposisi juga dengan merekrut mantan komandan Angkatan darat Prancis yaitu Paul Barril untuk membantu menjalankan operasi kudeta ini, ia didukung oleh 40 prajurit yang terlatih dari UAE, dan juga diberikan passport untuk kemudahan mobilitasnya. Ia juga mengatakan bahwa Mesir memberikan dukungan persenjataan dan Arab Saudi telah menyiapkan para pejuang suku untuk ikut membantu. Kemudian Barril mendapati protes dari Presiden Prancis untuk mengentikan operasinya, dan pada akhirnya usaha kudeta ini gagal karena pihak Qatar sudah mengetahui informasi tersebut (Thepeninsulaqatar, 2018).

Begitupun dengan peluncuran Jaringan TV Satelit *Al Jazeera* pada tahun 1996. Media tersebut dibentuk oleh mantan emir Qatar, Hamad Bin Khalifa Al

Thani untuk kemudian menjadi media yang independen. Sejak awal, *Al Jazeera* telah menyiarkan berita - berita ke seluruh dunia bahwa ada banyak negara di kawasan teluk yang bersikap tidak adil. Lalu Arab Saudi dan negara teluk lainnya menilai siaran berita *Al Jazeera* sebagai sumber ketidakstabilan yang bermotif politik (Kausch, 2015).

Lalu kekhawatiran diantara negara – negara tersebut menjadi nyata, dan terjadi pada tahun 2011 yakni *Arab Spring*. Fenomena tersebut merupakan gelombang protes politik di kawasan, yang menyuarkan reformasi sistem pemerintah dan seorang diktator untuk diturunkan dari jabatannya. Dan ini juga terjadi di wilayah timur Arab Saudi yang disebut Qatif, banyak massa yang turun kejalan untuk menyuarkan protes terhadap diskriminasi kerajaan Arab Saudi, sebab wilayah tersebut di dominasi oleh orang – orang Syi'ah yang diperlakukan secara tidak adil oleh kerajaan Arab Saudi. Mereka tidak bergerak sendiri, namun juga didampingi oleh seorang Ulama Syi'ah bernama Nimr Al Nimr, ia dikenal sebagai orang yang vokal melakukan protes terhadap kerajaan, hingga ia ditangkap pada tahun 2012, dan setelah melalui berbagai macam upaya investigasi pasca penangkapannya, pada tahun 2014 ia dipidana hukuman mati, yang berujung pada eksekusi pada tahun 2016 (DW, 2016). Perlu diketahui bahwa selama ini *Arab Spring* diliput dan disiarkan secara luas oleh media yang didukung oleh Qatar yaitu *Al Jazeera*, dan hal ini menyebabkan banyak penggulingan pemimpin di kawasan Timur Tengah.

Kerusuhan ini kemudian perlahan merambat hingga ke beberapa negara di kawasan teluk seperti Tunisia, Mesir dan Libya. Semua kekuatan revolusi ini menyelimuti timur tengah, dan terjadi hanya dalam waktu satu Tahun. Beberapa

negara oposisi mulai menyalahkan Qatar karena mendukung sejumlah kelompok Islam, kelompok yang ikut dalam dalam protes. Hubungan dekat Qatar dengan *Ikhwanul Muslimin* di Mesir dan afiliasinya di seluruh kawasan merupakan perhatian khusus bagi negara teluk. Sementara beberapa pihak melihat *Ikhwanul Muslimin* sebagai gerakan politik yang diakui, sebaliknya sejumlah negara teluk menganggapnya sebagai organisasi "Teroris" karena kelompok tersebut dilihat memiliki tujuan untuk menggulingkan sebagian besar pemerintah dan mendirikan "Negara Islam" yang luas dibawah pengaruhnya kekuasaannya. Maka sebagian besar negara di kawasan ini telah menindak tegas kelompok tersebut. Dukungan Qatar untuk *Ikhwanul Muslimin* adalah alasan utama di balik klaim negara-negara Sunni bahwa Qatar "mendukung terorisme" (Harb, 2017).

Iran, juga menjadi salah satu penyebab eskalasi ketegangan antara Arab Saudi dan Qatar. Qatar adalah salah satu negara terkaya di dunia per kapita setelah Saudi dan Qatar. Qatar adalah salah satu negara terkaya di dunia per kapita setelah aktif menjadi pengeksport gas cair *Liquefied Natural Gas* yang juga terbesar di dunia, serta sumber daya minyaknya yang besar berasal dari ladang gas Pars selatan atau Utara Dome di Teluk Persia, yang dikelola secara bersama dengan Iran. Tapi hubungan Qatar dengan tetangga Persia itu sempat kacau. Pada 2016, Qatar menarik duta besarnya dari Iran setelah kantor duta besar Arab Saudi di Teheran diserang oleh pengunjuk rasa (Hutapea, 2016). Ketegangan diplomatik terus berlanjut. Namun, hal ini membawa kembali ke kebuntuan politik antara Arab Saudi dan Qatar, yang mana ini adalah sebuah puncak konflik yang sebelumnya belum pernah terjadi.

Sebelumnya, pada bulan maret tahun 2014, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain menarik duta besarnya dari Doha. Bukan tanpa sebab, hal ini terjadi

karena ketiga negara tersebut melihat Qatar telah gagal menjaga kesepakatan keamanan yang ditandatangani oleh Arab Saudi dan Qatar pada tahun 2013 lalu, yaitu “Perjanjian Riyadh” yang membahas tentang tindakan intervensi terhadap isu atau permasalahan negara lain. Qatar dituduh telah melakukan kerjasama dengan Turki untuk mendukung *Ikhwanul Muslimin* di Mesir. Seperti yang dilansir dalam *Middle East Monitor*, Zulfikar mengatakan, ketiga negara tersebut menuding Qatar dan Turki menggali informasi tentang Gerakan Anti-Ikhwanul Muslimin dan rencana dukungan negara GCC untuk Mesir (Zulfikar, 2014).

Tuduhan Arab Saudi terhadap Qatar mengenai *Ikhwanul Muslimin* bukan tanpa alasan, jika dilihat yang terjadi pada *Arab Spring* tahun 2011, contoh terdekat yang sangat relevan dengan keselarasan pandangan sistem monarki di kawasan adalah rezim Ben Ali di Tunisia, dan Husni Mubarak di Mesir. Ini menjadi keresahan tersendiri bagi Arab Saudi, karena sejak tahun 2004 Qatar pernah memberikan dana terhadap individu dan kelompok ekstrimis ke negaranya, bahkan memberikan akses keluar masuk ke Doha.

Tahun 2015, Arab Saudi menginisiasi pembentukan aliansi melawan terorisme dan ekstrimisme, bersama 34 negara lainnya dengan kerjasama dan saling mendukung secara finansial, informasi dan politik. Pada awalnya aliansi ini dibentuk bertujuan melawan IS *Islamic State* yang saat itu adalah ISIS. Kebijakan Arab Saudi terhadap terorisme juga didukung oleh Amerika Serikat pada masa kepresidenan Barrack Obama, keduanya memang sudah menyepakati perjanjian kontra-terorisme sejak 2008. Maka posisi ini sangat jelas, bahwa selain Amerika Serikat ikut berperan dalam mendorong Arab Saudi untuk melawan terorisme, Amerika juga hadir sebagai pendamping sekaligus panutan bagi Arab Saudi

sebagai pendukung finansial. Keduanya sama – sama memiliki konsentrasi terhadap terorisme, dan ini selaras dengan kebijakan Amerika Serikat yang mulai diusung pasca 9/11 yakni “war on terror” (Winter, 2017).

Mengenai klaim kelompok radikal atau terorisme terhadap *Ikhwanul Muslimin*, ini terus menerus menjadi perdebatan bagi beberapa pihak, namun negara memutus hubungan diplomatik Qatar menetapkan secara sepihak bahwa mereka adalah gerakan terorisme. Perlu diketahui bahwa *Ikhwanul Muslimin* merupakan sebuah organisasi atau jamaah dakwah yang dibentuk oleh Hasan Al-Banna pada tahun 1928, dalam rangka membangun kembali persatuan umat islam yang sempat terpecah setelah runtuhnya Kekhilafahan Turki Utsmani. Guna membendung pengaruh – pengaruh dari Imperialisme barat, yakni Inggris dan Perancis, maka dibentuklah *Ikhwanul Muslimin* yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan dan politik. Organisasi ini berkembang luas karena kepiawaian sang pendiri dalam khutbahnya. Sehingga memiliki pengaruh kuat dalam perpolitikan Mesir. Pasca tumbanganya kediktatoran Husni Mubarak pada tahun 2011, gerakan ini semakin kuat dibawah kepemimpinan presiden baru mesir yakni Muhammad Mursi. Namun karena ia dinilai gagal dan lebih mementingkan *Ikhwanul Muslimin*, Mursyi pun dikudeta oleh pihak militer yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Abdel Fattah el-Sisi, dimana ini juga mendapat dukungan dari kerajaan Arab Saudi yang juga tidak menyukai *Ikhwanul Muslimin*. Maka hal ini yang kemudian menciptakan gesekan – gesekan yang berujung pada eskalasi konflik antara Qatar dan Arab Saudi. (Counterextremism, 2021).

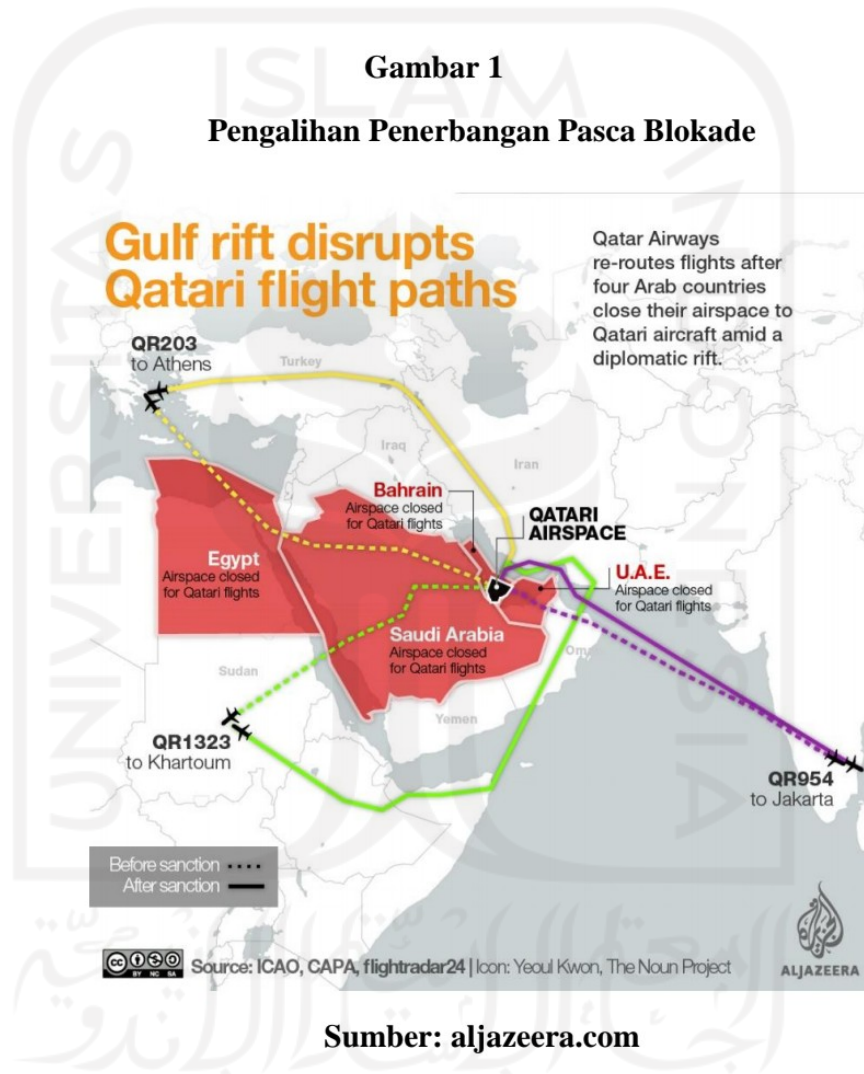
Berbicacara tentang *Ikhwanul Muslimin* maka tak luput dari nama Syeikh Yusuf Al-Qardhawi sebagai salah satu tokoh penting dan berpengaruh bagi

mereka, ia selalu bersuara kritis tidak hanya terhadap pemerintah mesir, akan tetapi seluruh ketidakadilan monarki dan rezim di kawasan. Kedekatan Syeikh Yusuf Al-Qardhawi dengan kerajaan Qatar dan *Ikhwatul Muslimin* memberikan keleluasaan ruang-gerak dalam penyampaian baik dakwah maupun kritik – kritik terhadap kediktatoran. Kondisi ini semakin menguntungkan dengan adanya media yang didanai penuh oleh Qatar, yaitu *Al-Jazeera*, dimana media ini aktif dalam menyiarkan seruan-seruan dan memfasilitasi orang – orang yang tidak memiliki keberanian untuk bersuara terhadap pemerintah atau kerajaan (Counterextremism, 2021).

2.3 Pemutusan Diplomatik Qatar

Tepatnya tanggal 23 juni 2017, menteri luar negeri Qatar Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani menyatakan bahwa berita yang tersebar di *Qatar News Agency* tentang memuji Hamas, hubungan dengan Iran dan Israel adalah tidak benar. Pihaknya mengaku media tersebut telah diretas oleh pihak tidak bertanggungjawab dan sengaja ingin memecah-belah hubungan negara teluk. Hal ini kemudian diikuti dengan embargo dan pemutusan hubungan diplomatik secara resmi oleh Arab bersama beberapa negara teluk lainnya. Pada tanggal 5 Juni 2017, puncak krisis dimulai saat beberapa negara teluk mulai memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar secara terkoordinir dalam rangka mendukung keputusan Arab Saudi. Diawali dengan pemutusan hubungan diplomatik oleh Bahrain dengan Qatar, yang kemudian berbuah pada deretan pemutusan diplomatik dan pemberhentian penerbangan oleh beberapa maskapai seperti penutupan penerbangan Etihad dan Emirates dari Abu Dhabi dan Dubai

secara keseluruhan ke Doha, pembatalan semua penerbangan maskapai FlyDubai, Saudi Airlines, dan Air Arabia ke Doha. Kemudian Arab Saudi mulai menutup semua perbatasan baik darat maupun laut dengan Qatar. Lalu Mesir ikut memutuskan hubungan diplomatik dengan menarik duta besarnya yang berada di Qatar (Aljazeera, 2017).



Hingga, pada tanggal 6 Juni 2017 Arab Saudi dan negara – negara arab sunni lainnya secara resmi memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Qatar. Negara-negara yang dipimpin oleh Saudi, mengklaim Qatar adalah pendukung kelompok teroris di kawasan. Negara - negara itu memutuskan

hubungan dan berhenti mengekspor ke Qatar sebagai tetangga yang menerima 40% dari semua makanannya melalui Arab Saudi, hal ini memicu kekurangan pangan massal di negara itu, kecuali jika Qatar memenuhi syarat dari daftar 13 permintaan yang ditetapkan oleh oposisi Saudi (Aljazeera, 2017). Daftar tersebut diantaranya:

1. Mengurangi hubungan dengan Iran.
2. Menutup pangkalan militer Turki di Qatar.
3. Memutuskan hubungan dan menghentikan pendanaan dengan teroris berbasis organisasi dan individu.
4. Memutuskan hubungan dengan semua organisasi teroris khususnya *Ikhwanul Muslimin*, ISIL, Al-Qaeda, Fateh Al-Sham, Hizbullah Lebanon. Dan menyetujui bahwa kelompok tersebut sebagai teroris.
5. Menyerahkan pembangkang dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain yang tinggal di Qatar dan membekukan aset mereka.
6. Mengakhiri intervensi terhadap keempat negara tersebut.
7. Menutup jaringan berita *Al-Jazeera* dan media yang berafiliasi.
8. Menyelaraskan kebijakan dengan negara teluk dan Arab lainnya.
9. Membayar reparasi dan kompensasi.
10. Pengawasan penuh terhadap Qatar oleh negara teluk lainnya.
11. Menutup seluruh outlet berita yang secara langsung dan tidak langsung dibiayai oleh Qatar, seperti Arabi21, Rassd, Al Araby, Al Jadeed, Mekameleen, dan Middleeasteye
12. Menyetujui tuntutan dalam waktu 10 hari atau daftar tersebut akan invalid.

13. Menyetujui audit bulanan di tahun pertama setelah menyetujui tuntutan dan berlaku hingga 10 Tahun.

Mengutip dari *Aljazeera*, Menteri luar negeri Qatar mengatakan Doha tidak akan memenuhi satupun dari 13 permintaan yang dibuat oleh Arab Saudi dan sekutunya, dan justru ingin mengedepankan dialog untuk menyelesaikan keadaan darurat tersebut. Sheikh Mohammed Abdulrahman Al Thani berbicara pada konferensi pers di Roma, menganggap seluruh daftar tersebut memang dibuat untuk ditolak, karena hal tersebut dinilai secara tidak langsung melanggar kedaulatan dan tidak memberikan kebebasan berpendapat, sebagaimana sistem internasional memahami bahwa dunia tidak diatur dibawah ultimatum melainkan Hukum Internasional (Aljazeera, 2017).

2.4 Dampak Pemutusan Diplomatik

Pemberian tuntutan tersebut memiliki berbagai macam dampak langsung seperti kesulitan aktivitas Haji yang harus melewati Qatar untuk sampai ke Mekkah, namun pihak kerajaan Arab Saudi berjanji akan tetap melayani dan memberikan kemudahan dalam segala prosesnya. Dalam isu lain, pihak kerajaan Arab Saudi juga menyampaikan bahwa bagi setiap warga Qatar yang tinggal atau berkeluarga di Arab Saudi harus segera meninggalkan negara tersebut, begitupun sebaliknya bagi warga Arab yang tinggal, berkeluarga atau hanya berwisata di Qatar, diwajibkan untuk segera kembali ke Arab Saudi dalam waktu 14 hari.

Pemutusan diplomatik terhadap Qatar juga memberikan dampak signifikan terutama dalam sektor pangan, secara geografis tanah dan cuaca Qatar tidak mendukung untuk bercocok tanam, oleh karena itu 2,4 juta warga Qatar 99% menerima pangan dari luar (Taylor, 2017). Demikian juga diberitakan bahwa Qatar menyewa 40 ribu hektar di Kenya untuk menanam Ladang. Oleh karena itu pasca pemutusan diplomatik oleh beberapa negara GCC, membuat kesulitan pasokan pangan untuk warga Qatar, sehingga banyak warga yang memenuhi supermarket untuk menimbun pasokan (Rice, 2008).

Gambar 2



Sumber: twitter @zabmustefa

Hal ini disebabkan negara seluruh negara yang memutuskan diplomatik itu menutup jalur darat dan laut dalam rangka memblokade Qatar. Namun, setelah kejadian tersebut, Iran mengirimkan bantuan pangan melalui udara, pihaknya mengatakan akan terus mengirim 100 ton pangan setiap harinya selama Qatar masih membutuhkan (Taylor, 2017).

BAB III

FAKTOR PEMUTUSAN DIPLOMATIK QATAR OLEH ARAB SAUDI TAHUN 2017

Sejatinya hubungan Saudi dengan Qatar mengalami pasang surut dari tahun ke tahun. Sebelum 2017 Saudi memiliki hubungan fluktuatif bahkan memiliki hubungan yang harmonis seperti Kerjasama yang dilakukan kedua negara antara Saudi dan Qatar di bidang militer untuk melawan rezim Bashar Al Assad di Suriah. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Saudi dan Qatar semakin renggang. Sampai pada akhirnya hubungan semakin memburuk dengan upaya untuk memutuskan hubungan bilateral antara Saudi dan Qatar. Diantara faktor yang menyebabkan Saudi memutuskan hubungan dengan Qatar antara lain: Saudi ingin mempertahankan dan pengaruh kekuasaannya khususnya di timur tengah melalui dukungan regional di timur tengah, kemudian adanya perbedaan sudut pandang aliran antara ikhwanul muslimin (Qatar) dan salafi wahabi (Saudi), serta adanya peran media yang mendiskreditkan Saudi didunia Islam dan internasional. Hal ini dikarenakan media *Aljazeera* membantu menyuarakan dan mengkritisi sistem monarki bagai negara negara timur tengah.

Ketiga objek tersebut akan dianalisis melalui pendekatan realisme. Realisme merupakan sebuah teori yang beranggapan bahwa segala bentuk tindakan yang dilakukan sebuah negara adalah untuk mencapai kepentingan sendiri. Dalam hal ini tujuannya adalah melihat motif Arab Saudi dalam mengambil langkah untuk memutuskan hubungan dengan Qatar demi kepentingannya sendiri. Maka pembahasan dalam bab 3 nantinya akan mengarah kepada bagaimana objek tersebut mempengaruhi Arab Saudi.

3.1 Dukungan Regional dan Amerika

Salah satu alasan Arab Saudi ingin memutuskan diplomatik adalah ini Arab Saudi memang mendominasi, secara geografis, dan ekonomi. Hal ini membuat Saudi berkeyakinan untuk memutuskan hubungan dengan Qatar, terlebih lagi Saudi mendapat dukungan dari barat, terutama Amerika dan sekutunya. Arab Saudi juga tidak ingin ada hegemoni lain dikawasan selain dirinya sendiri, dan Qatar dilihat memiliki potensi sebagai ancaman baru dalam persaingannya dengan Iran. Dengan 13 tuntutan yang ditujukan untuk Qatar, semakin memperjelas kekhawatiran dan menambah kekeruhan hubungan Qatar dengan negara teluk lainnya, khususnya Arab Saudi sebagai hegemoni yang terkuat di kawasan tersebut, terindikasi memiliki ketakutan akan kebangkitan karena kemandirian Qatar dalam menjalankan kebijakan negaranya.

Arab Saudi sebagai negara pemimpin GCC tentu selain karena memiliki *power* hampir di segala aspek dibandingkan negara teluk lainnya, melainkan juga hubungan bilateralnya dengan negara barat, hal ini menjadi eksistensi Arab Saudi dikawasan tersebut. Yang kemudian semakin mendorong-kuat keyakinan Arab Saudi dalam berpolitik. Seperti hubungannya dengan Amerika Serikat, sebagai salah satu negara kuat di barat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Blanchard, Amerika Serikat dan Arab Saudi memiliki hubungan yang cukup baik di sektor keamanan. Ia menegaskan bahwa selama ini Amerika Serikat telah banyak membantu tentara Arab Saudi dalam pelatihan, perdagangan senjata serta perawatannya. Bahkan sejak 2009 hingga 2010 Arab Saudi meningkatkan kekuatan udaranya dengan membeli pesawat F-15 dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat, Trump juga akan terus memperdalam kerjasama militernya

dengan Arab Saudi, baik yang sudah dijalankan oleh Administrasi presiden Barrack Obama, maupun yang baru. Kerjasama ini tak lain, dalam rangka menunjang kemajuan keamanan Arab Saudi di Timur Tengah, melihat keadaan yang tidak stabil dan dikelilingi kelompok – kelompok ekstrimis regional maupun transnasional. Sehingga kedua negara sepakat untuk saling membantu dan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Selain pendampingan militer, diperkirakan total biaya kerjasama pelatihan militer Arab Saudi dengan Amerika mencapai \$10 ribu sampai \$25 ribu per tahun (Blanchard, 2020).

Sementara dukungan dari luar cukup signifikan, demikian juga yang terjadi dalam regional, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir, mereka sejalan dengan pemikiran pendiri GCC Arab Saudi, selain mereka juga mendukung kebijakan anti-terorisme, dalam beberapa dinamikanya kedua negara juga tidak menyukai Qatar karena mendukung *Ikhwanul Muslimin* dan berafiliasi dengan beberapa kelompok ekstrimis yang terlarang seperti Al Qaeda dan Al Nusr. Bukan tanpa alasan, mereka mengatakan demikian karena Qatar diduga telah memberikan fasilitas, tempat tinggal bagi gerakan – gerakan ini, bahkan memberikan dukungan finansial. Inilah kemudian yang menjadi penyebab utama Arab Saudi mengambil sikap politiknya dengan memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Karena bukan hanya Arab Saudi saja, namun kebanyakan negara anggota GCC juga tidak sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Qatar selama ini, khususnya pada isu – isu yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya (Harb, 2017).

3.2 Hubungan Qatar dengan Ikhwanul Muslimin

Sebagaimana telah didirikan sejak tahun 1928 oleh Hasan Al Banna, tepatnya di kota Isma'iliya Mesir, *Ikhwanul Muslimin* perlahan menjadi tumpuan kebangkitan umat Islam. Berdirinya *Ikhwanul Muslimin* secara khusus bertujuan untuk menyatukan kembali umat Islam yang terbengkalai pasca runtuhnya Kerajaan Turki Usmani. Secara garis besar, gerakan ini adalah bentuk respon terhadap krisis sosial-politik dan dominasi barat di wilayah penduduk yang mayoritas beragama Islam. Gerakan ini lahir di tengah genggamannya rezim politik dan penjajah. Singkatnya, berkat keahlian dakwah Hasan Al Banna mulai dari lapisan bawah masyarakat, *grass-root* hingga komunikasi massa, kesuksesannya membawa *Ikhwanul Muslimin* ke permukaan dan keterlibatan dalam perpolitikan negara. Tujuannya adalah secara politik mereformasi sistem negara dan menerapkan paham Islam Universal, dengan konsep yang modern, dalam arti Islam yang lebih terbuka dan demokratis. Kondisi ini tentu sangat berseberangan dengan latar belakang kebanyakan rezim serta Imperialis, dimana kekuatan dan pengaruhnya lebih dominan saat itu (Rosmaladewi, 2015).

Dalam peninjauan yang lebih spesifik, kedekatan Qatar dan *Ikhwanul Muslimin* ialah terkait dukungan dalam segi pendanaan dan fasilitas. Qatar adalah negara yang paling terbuka dengan gerakan ini dibandingkan dengan negara teluk lainnya. Hubungan keduanya tidak terlepas dari satu nama besar yakni Syeikh Yusuf Al Qaradawi, ia adalah salah satu *Ulama* yang cukup terkenal di Mesir dan juga penggemar Hasan Al Banna (Pendiri *Ikhwanul Muslimin*). Setelah di kirim ke Qatar pasca pengusirannya dari Mesir pada tahun 1961, ia mulai membantu memajukan pendidikan di Qatar, hingga ia mendirikan *Sharia Faculty* di

Universitas Qatar dan juga menjabat sebagai Direktur Pusat Penelitian Sunnah di universitas tersebut. Hadirnya Qaradawi memberikan dampak baik bagi Qatar dan tidak hanya dalam bidang pendidikan, melainkan juga masyarakat umum, ia semakin dikenal lewat tayangan resmi “*Sharia and Life*” yang dimuat dalam stasiun televisi *Aljazeera*. Hasilnya, pada tahun 1969 Qaradawi mendapatkan kewarganegaraan dan pendanaan dakwah ke dunia Internasional oleh Emir Qatar, bahkan ia menjadi guru agama pribadi Emir sejak saat itu (Johnston, 2014).

Selain itu peran - peran *Ikhwanul Muslimin* dalam partisipasi politik salah satunya ditunjukkan pada tahun 2011 dimana Partai Ennahda Tunisia yang terinspirasi oleh gerakan Ikhwan ini menang dalam pemilihan parlemen pasca kudeta terhadap Presiden Tunisia Zine El Abidine Bin Ali. Lalu pada tahun 2012, *Ikhwanul Muslimin* mengajukan seorang kandidat dalam pemilihan presiden di Mesir, yakni Muhammad Mursi dan menang sebagai Presiden pertama yang dipilih melalui sistem demokrasi, namun hanya bertahan selama 1 tahun disebabkan kudeta oleh menteri pertahanannya Al Sisi, yang juga didukung oleh Arab Saudi (Aljazeera, 2017). Begitupun di Yordania, *Ikhwanul Muslimin* menjadi kelompok terbesar dan mendominasi pasang-surut perpolitikan di kerajaan tersebut (Sharif, 2015).

Perlu dipahami bahwa Arab Saudi adalah negara Islam yang memiliki latar belakang paham Wahabi, dimana segala kegiatan Islami yang tidak tertulis dan diajarkan pada zaman Nabi adalah haram untuk di praktekan, sementara paham *Ikhwanul Muslimin* ialah Islam Modern, dimana mereka lebih dapat menerima bahkan terbuka dengan beberapa nilai – nilai barat seperti demokrasi dan demonstrasi, yang dianggap dapat diterapkan secara bersamaan dengan ajaran Al

Qur'an dan Sunnah. Tentu sangat berbeda dengan Arab Saudi yang jauh lebih konservatif dalam ini, dimana paham wahabi menekankan pada ketaatan terhadap seorang Raja (Wardoyo, 2018, pp. 87, 89).

Dalam sebuah artikel dikatakan, oleh Ridwan Ziadeh bahwa PBB sendiri tidak menganggap Ikhwanul Muslimin sebagai jaringan terorisme, maka pelabelan teroris terhadap *Ikhwanul Muslimin* oleh beberapa negara teluk masih menjadi pertanyaan besar. Alih – alih berpandangan akan berakibat pada kestabilan politik dan keamanan di kawasan, hal ini menunjukkan bagaimana rezim politik beberapa negara teluk tidak ingin kepentingannya terganggu, khususnya bagi Arab Saudi dengan menetapkan secara sepihak bahwa *Ikhwanul Muslimin* adalah organisasi teroris (Ziadeh, 2017).

Adapun respon Arab Saudi terkait hubungan Qatar dengan *Ikhwanul Muslimin* ditunjukkan pada Perjanjian Riyadh 2013-2014, dimana Arab Saudi menuntut Qatar untuk berhenti mendukung *Ikhwanul Muslimin*, dan kemudian berujung pada tuntutan yang sama pasca pemutusan diplomatik kedua negara pada tahun 2017. Dan menurut Ziadeh, Arab Saudi juga mengklaim secara sepihak terkait *Ikhwanul Muslimin* sebagai gerakan terorisme, sementara PBB tidak menganggap demikian (Ziadeh, 2017).

3.3 Kekhawatiran terhadap media Aljazeera

Aljazeera didirikan di Doha, Qatar, pada tahun 1996 dan dibiayai oleh pemerintah Qatar sebesar \$137 Juta sebagai dana operasional pembentukannya. *Aljazeera* telah lama menjadi media yang *frontal* dalam penyajiannya, keberaniannya memuat isu – isu sensitif baik di negeri arab maupun dunia internasional, membuatnya menjadi media yang paling dilihat oleh publik (Azran, 2013). Hal ini dibuktikan hanya dalam waktu 5 tahun, pada tahun 2001 *Aljazeera* adalah stasiun televisi berita Arab yang paling sering di lihat, dan hingga 10 tahun selanjutnya telah menjadi pilihan pertama atau kedua bagi lebih dari tiga perempat orang Arab. El-Nawawy dan Powers ikut menegaskan bahwa pembentukan *Aljazeera* juga merupakan usaha Emir Qatar muda sebagai bentuk demokratisasi atau kebebasan berpendapat melalui media, dan menjadikannya sebagai media yang independen tanpa campur-tangan pemerintah. Hal ini dipertegas oleh Samuel Azran dalam penelitiannya, ia mengungkap bahwa pemberian dana dari Emir Qatar bukanlah hibah dan merupakan pinjaman yang kemudian akan dikembalikan oleh *Aljazeera*. Meskipun demikian, faktanya Emir Qatar memperpanjang jangka waktu pinjaman tanpa batas untuk membantu menutup keuntungan dari yang hanya mencapai 35% hingga 40% dari periklanan (Azran, 2013). Bahkan pemerintah Qatar selama ini telah berinvestasi sebesar \$1 Miliar untuk *Aljazeera*, tegas Tony Burman dalam *Forbes Magazine* (Helman, 2009).

Lahirnya *Aljazeera* dilihat sebagai pembaharuan sudut pandang bagi bangsa Arab terhadap apa yang terjadi di kawasan regional. Berkaitan dengan hal tersebut, Nawawy dan Powers juga mengatakan bahwa *Aljazeera* bertujuan menyediakan konten politik bagi orang – orang Arab. Mereka mengutip

Muhamad Zayani yang meyakini bahwa *Aljazeera* telah memahami politik sebagai instrumen penting yang berperan dalam kehidupan sehari – hari bagi warga arab, sebagaimana audiens menginginkan analisa dan berita politik yang berkualitas (Nawawy, 2008). Dibuktikan dari salah satu program acara *Aljazeera* yang menayangkan sebuah perdebatan antara dua orang yang memiliki perbedaan pendapat terkait isu – isu tertentu, dan tema yang pada saat itu masih tabu diantaranya sex, poligami dan korupsi. Acara tersebut bertajuk *The Opposite Direction* yang ditayangkan secara *live* atau langsung setiap minggu (*Aljazeera*, 2006).

Pandangan lain juga diutarakan oleh Tomy Burman, mantan Direktur *Aljazeera English* di Qatar sejak tahun 2008 hingga 2010, ia mengatakan *Aljazeera* bertujuan menarik perhatian penonton yang bosan terhadap sudut pandang Barat dan menginginkan perspektif yang lebih luas (Helman, 2009). Argumen ini kembali ditegaskan oleh Tomy Burman dalam rekaman radio tanya jawab oleh *Talk To The Nation* NPR, ia mengungkapkan bahwa *Aljazeera* memang dibuat untuk dunia Arab di Timur Tengah yang diatur dengan kediktatoran dan hadirnya media ini menjadi sebuah nafas-lega bagi kebebasan berekspresi dan beropini (Conan, 2008).

Tidak hanya bagi dunia Arab, pada tahun 2001 *Aljazeera* menjadi konsumen dunia barat dan mulai menarik perhatian sejak kejadian 9/11. Karena pada umumnya saat itu dunia itu mengenali Osama Bin Laden dari video yang tayang di *Aljazeera*. Faktanya, dikutip dari *The Guardian*, pada masa perang Afghanistan *Aljazeera* adalah satu – satunya media yang memiliki hubungan satelit langsung dengan Kabul selama 24 jam penuh. Berbagai dugaan dan

tuduhan pun bermunculan, yang menyatakan bahwa *Aljazeera* berafiliasi, memberi dukungan dan memprovokasi dengan menyediakan platform untuk berbicara (Whitaker, 2011). Badawi Sadig dalam bukunya yang berjudul *Aljazeera in the Gulf and in the World* menyebutkan bahwa *Aljazeera* berhasil menjadi media yang sangat sukses berkat semua program siaran-langsungnya terhadap kondisi politik dan konflik yang terjadi mulai dari invasi Iraq, perang Afganistan, *Second Intifada* palestina, perang saudara di Lebanon. Bahkan menjadi satu – satunya media yang diizinkan meliput di Afganistan, dan memberikan platform bagi Taliban. Di waktu yang bersamaan, keberhasilan tersebut juga menuai banyak kritik dari Timur hingga ke barat, seperti pemimpin Kuwait, Yordania, Libya, Mesir dan Tunisia (Sadig, 2019).

Kondisi ini kemudian mengarah kepada *Arab Spring*, karena beberapa fenomena konflik dan pemberontakannya banyak diberitakan oleh *Aljazeera*, seperti yang terjadi di Tunisia pada bulan desember 2010. Unjuk rasa bermula disebabkan oleh seorang pedagang kaki lima Mohamad Bouazizi yang membakar dirinya karena lelah dengan kondisi ketidakadilan pemerintah terhadap dirinya. Hal ini menimbulkan banyak protes dan demo dari masyarakat lokal, hingga pada 4 Januari 2011 Bouazizi meninggal dan hal ini menyebabkan penggulingan Presiden Tunisia Ben Ali yang kemudian melarikan diri ke Arab Saudi (Ryan, 2011). Dalam sebuah penelitiannya, Sakila menyimpulkan *Aljazeera* adalah media paling berpengaruh dalam revolusi di Tunisia, dibandingkan media – media lain, *Aljazeera* aktif mengumpulkan informasi dan menyiarkan berita tentang aksi bunuh diri tersebut dibandingkan media – media lokal. Walaupun pemerintah Tunisia telah melarang *Aljazeera*, namun mereka memanfaatkan *facebook* dan

twitter sebagai alternatif mengumpulkan video – video dan gambar untuk diunggah kembali, juga disiarkan ke stasiun televisi. Bahkan, masyarakat sipil Tunisia juga memberikan banyak informasi kepada *Aljazeera*, karena mereka tidak percaya dengan kredibilitas media lokal (Sakila, 2016).

Kejadian serupa juga terjadi di Mesir, yaitu penggulingan kediktatoran Husni Mubarak yang menjabat sebagai Presiden selama 30 tahun. Dalam tesisnya Jameel menjabarkan mulai dari tanggal 23 Januari 2011 hari pertama unjuk rasa hingga pasca kudeta tanggal 10 februari, tentang bagaimana *Aljazeera* menayangkan situasi yang terjadi. Selain itu *Aljazeera* menyadari bahwa tokoh atau pemimpin agama memiliki peran penting untuk menyatukan masyarakat dalam revolusi ini, sehingga mereka membingkai para pemimpin agama dalam beritanya dengan baik dan terhormat, dikarenakan rata – rata penontonnya adalah orang timur tengah dan religius (Yehia, 2011). Hijjawi dalam bukunya juga menegaskan, bahwa Doha mengirim beberapa orang ke Tahrir Square secara diam – diam untuk meliput kejadian karena sebelumnya banyak reporter yang ditahan selama beberapa minggu. Pada kenyataannya, *Aljazeera* bisa mengirim reporternya ke beberapa kota di Mesir, bahkan mendapat bantuan dari reporter amatir (Hijjawi, 2011).

Dalam sudut pandang yang lebih spesifik pada penelitian ini, dapat dipahami bahwa *Arab Spring* adalah sebagai fenomena penggulingan beberapa diktator di negeri Arab, juga sebuah agenda demokratisasi sistem pemerintahan yang selama ini memegang kekuasaan dengan waktu yang cukup lama, dan mengundang banyak pihak untuk ikut serta memberikan dukungan sekaligus menjaga pengaruh politik dalam rangka menjaga hegemoni di kawasan (Kausch,

2015, p. 12). Kompleksitas ini yang kemudian menjadi salah satu kekhawatiran Arab Saudi sebagai reformasi ideologi secara masal, yakni demokrasi yang dibawa ke kawasan oleh *Ikhwanul Muslimin* melalui kehadirannya di berbagai negeri teluk, di sisi lain *Aljazeera* juga hadir menjadi platform yang aktif dalam menyiarkan berbagai macam konfliknya. Pada tahun 2002 Arab Saudi sempat menarik duta besarnya dari Qatar dan melarang *Aljazeera* menayangkan kegiatan Haji ke Makkah, hal disebabkan eskalasi kedua negara karena saat itu Amerika Serikat sempat memindahkan pangkalan militernya dari Riyadh, Arab Saudi ke Al Udeid Qatar, serta menayangkan *talkshow* yang berisi kritik yang menjurus kepada Arab Saudi (Azran, 2013, p. 1299).

Respon Arab Saudi terhadap *Aljazeera* kemudian ditunjukkan dalam perjanjian Riyadh tahun 2013 - 2014 yang secara khusus juga menyatakan untuk menurunkan tensi kritik media *Aljazeera* terhadap negara – negara teluk. Puncak kecurigaan Arab Saudi terbukti pada tanggal 5 juni 2017, dimana Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memutuskan diplomatiknya dengan Qatar. Sehari setelah itu disusul dengan pemberian 13 tuntutan yang harus dipenuhi oleh pihak Qatar dan salah satu poin dari tuntutan tersebut adalah penutupan stasiun *Aljazeera* serta media yang berafiliasi, dan media – media lain yang juga didanai oleh Qatar seperti, Arabi21, Rassd, Al Arabi Al Jadeed, dan Middle East Eye. Tamara Kharroub menjelaskan bahwa tuntutan untuk menutup *Aljazeera* adalah agenda Arab Saudi, dan dinilai melanggar kebebasan pers, prinsip hak asasi manusia dan Hukum Internasional. Ia juga menegaskan bahwa tuntutan tersebut bertujuan untuk menekan semua media yang bersifat kritis terhadap rezim (Kharroub, 2017).

Maka, beberapa sebab Arab Saudi tidak menyukai *Aljazeera* adalah selain karena afiliasi dan pendanaannya dari Qatar, media tersebut juga telah menjadi platform penyebaran dakwah gerakan *Ikhwanul Muslimin* dalam beberapa acara seperti *Sharia and Law, The Opposite Direction* dimana pengisi acara tersebut adalah Sheikh Yusuf Al Qaradawi, salah satu tokoh yang juga tidak disukai oleh Arab Saudi. Begitupun dengan liputan dan dukungannya terhadap pengunjuk rasa kudeta Ben Ali di Tunisia, dan Husni Mubarak di Mesir saat *Arab Spring*. Sebagaimana Kharroub menganalisa bahwa tuntutan yang dilakukan oleh Arab Saudi pada tahun 2017 tersebut tidak mengindahkan Hukum Internasional yang menjamin kebebasan Pers (Kharroub, 2017).

3.4 Posisi Qatar di tengah Arab Saudi dan Iran

Masalah yang terjadi antara Arab Saudi dan Qatar semata – mata tidak hanya disebabkan oleh gerakan transnasional, atau media saja, melainkan juga berkaitan dengan kerjasama minyak dan perbedaan Ideologi Agama Islam, antara Sunni dan Syi'ah. Ini menjadi dilema tersendiri, pasalnya Qatar berada di tengah perbedaan tersebut secara nyata, yang dalam hal ini ada keberlangsungan hubungan timbal balik antara Qatar dan Iran dalam sektor ekonomi, yakni Ladang minyak. Namun, sebagai negara yang tergolong kecil Qatar menyadari kekuatan kedua negara tersebut, terutama Arab Saudi sebagai negara yang memiliki hegemoni di kawasan. Secara geografis, Qatar memiliki jarak yang lebih dekat dengan Arab Saudi dibandingkan Iran. Sehingga Qatar memilih untuk tidak memiliki kecenderungan dukungan terhadap keduanya. Tidak hanya dengan Iran dan Arab Saudi, sebuah konflik yang populer dengan sebutan “tank war” atau

perang kapal tangki pada tahun 1980 an, terjadi di Teluk Persia yang melibatkan Iraq, Iran, Kuwait, Arab Saudi dan Amerika Serikat. Konflik ini berlangsung selama 4 tahun, bahkan Iran sempat menyerang kapal tanker milik Arab Saudi di sekitar lepas pantai Qatar. Tentu konflik ini membawa tensi dan ketidaknyamanan bagi Qatar (Kamrava, 2017).

Qatar dan Iran telah membangun hubungan bilateral yang cukup baik di beberapa sektor, diantaranya ekonomi dan keamanan. Seperti halnya pembagian Ladang Minyak Utara dan Selatan Dome, yang terletak di wilayah Teluk Persia. Kedua negara bersama – sama mengontrol ladang gas tersebut dengan Qatar di bagian Utara dan Iran di bagian Selatan. Dan secara geografis lapangan gas ini terbentang seluas 97ribu km kubik di wilayah perairan kedua negara, 60ribu di wilayah Qatar dan 37rb di wilayah Iran. Kamrava dalam tulisannya menjelaskan sejak tahun 1990an Qatar mulai melihat Iran sebagai negara memiliki potensi untuk diajak bekerjasama dalam bidang keamanan, hal tersebut dikonfirmasi oleh menteri luar negeri Qatar. Maka Qatar dan Iran sepakat bekerjasama dalam rangka pengembangan proyek sebesar \$3 Miliar untuk Lapangan gas selatan (Kamrava, 2017).

Memasuki tahun 2000an, kedua negara memiliki hubungan yang cukup hangat, sebagaimana Qatar menyadari bahwa Iran bisa menjadi kekuatan tandingan dalam regional, dan sebaliknya, Iran menyadari bahwa Qatar memiliki potensi penyeimbang hubungannya dengan beberapa negara teluk seperti Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab. Bahkan hubungan kedua negara masih terjalin dengan baik di kala Iran perang dengan Amerika pada tahun 2003. Hingga pada tahun 2006, presiden Iran menyatakan bahwa mereka akan tetap menjaga

hubungan yang baik dengan Qatar dalam sektor ekonomi, dalam hal ini yang dimaksud kerjasama pengolahan minyak dan gas. Hubungan kedua negara tetap terjalin dengan baik dan ini menguntungkan keduanya walaupun jika dibandingkan, Qatar seringkali mendapat keuntungan lebih banyak dari pengelolaan ini, baik dari minyak maupun gas. Seperti yang dijabarkan oleh Kamrava, pada tahun 2011 Qatar diperkirakan mengambil pendapatan sebesar \$120 juta perhari dimana Iran hanya \$30 juta, bahkan per tahun Qatar mendapat keuntungan sebesar \$37 Miliar. Begitupun pada tahun 2012, penambangan oleh Qatar lebih unggul dengan menghasilkan 450 ribu barel per hari sementara Iran hanya 35 ribu per hari. Hingga pada tahun 2014 Iran menambah jumlah rig pengeboran sebanyak 17 tempat sementara Qatar hanya 6 tempat (Kamrava, 2017). Selama ini hubungan Qatar dengan Iran cukup stabil walaupun tahun 2016 silam dalam menjaga nama baik di mata saudaranya (Arab Saudi), Qatar sempat menarik duta besarnya dari Iran, karena terjadi pembakaran kantor duta besar Arab Saudi di Teheran oleh pengunjung rasa yang memprotes atas eksekusi mati terhadap ulama Iran yaitu Nimr Al Nimr (Aljazeera, 2016).

Perlu diketahui, bahwa saat ini Qatar sedang berada ditengah dua negara besar yang sangat berpengaruh di Timur Tengah, yakni Arab Saudi dan Iran. Keduanya adalah negara yang sama – sama berlomba memperkuat hegemoni di kawasan, dengan berbagai macam keterlibatannya dalam sebuah konflik. Seperti yang terjadi di Suriah, pemerintah Arab Saudi mengirimkan bantuan – bantuan berupa dana dan senjata terhadap kelompok oposisi yang dijuluki *Free Syrian Army* FSA, sementara Iran berada di belakang kelompok Hizbullah untuk mendukung rezim Bashar Al Assad (Moussaoui, 2014). Sebagaimana Jones dan

Markusen mengungkap dalam tulisannya, bahwa Iran memiliki peran penting bagi Hizbullah dengan memberikan pelatihan dan pendanaan, para pemimpin Iran memang ingin memperluas kekuasaan dan pengaruhnya melalui Hizbullah, ditandai sejak revolusi Iran 1979 dimana Ayatullah Ali Khomeini sebagai pemimpin tertinggi Syi'ah telah merubah arah kebijakan Iran melawan Barat (Jones, 2018). Aktor lain seperti Amerika Serikat juga terlibat secara tidak langsung melalui CIA, dibawah perintah presidennya saat itu Barrack Obama, karena mereka menyadari bahwa Arab Saudi pasti akan membantu secara finansial. Demikian yang dijelaskan oleh Mazzetti dan Apuzzo dalam *New York Times* (Mark Mazzetti, 2016).

Menurut Joserizal yang dikutip dari jurnal milik Fahham dan Kartaatmaja, eskalasi konflik yang terjadi di Suriah semata – mata bukan persoalan pergantian rezim saja, melainkan karena keterlibatan aktor – aktor besar lainnya dari luar yang tertarik dengan potensi yang dimiliki negara Suriah. Jika konflik tersebut memang murni karena oposisi menginginkan reformasi, mengapa hal ini tidak terjadi di Qatar dan Arab Saudi, sebagaimana keduanya adalah negara monarki (Fahham, 2014). Hal ini juga dipertegas oleh seorang peneliti tentang negara – negara Arab, Anna Sunik, di Deutsche Welle ia menyatakan bahwa konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran di Suriah merupakan perang ideologi Islam antara Sunni dan Syi'ah sebab (Moussaoui, 2014). Ketegangan antara kedua negara juga pernah terjadi setelah Arab Saudi mengeksekusi Nimr Al Nimr, seorang ulama Syi'ah yang aktif dalam mendampingi minoritas Syi'ah di Arab Saudi. Kejadian ini menuai protes warga Iran dengan melakukan aksi pembakaran dan pengrusakan kantor duta besar Arab Saudi di Teheran, disusul dengan

pemutusan diplomatik oleh Arab Saudi (Aljazeera, 2016). Sunni dan Syi'ah memang memiliki perbedaan yang mendasar, hal ini dipertegas oleh laporan Fadel seorang reporter media NPR yang terjun langsung di wilayah arab Saudi yang di dominasi Syi'ah, bahwa orang Syi'ah di Arab Saudi diperlakukan secara tidak adil, mereka tidak bisa menjabat di pemerintahan, militer, bahkan tidak diperbolehkan mengajar agama di sekolah umum (Fadel, 2016).

Hingga saat ini, dunia internasional bahkan umat muslim sendiri menyadari akan perbedaan antara Arab Saudi dan Iran, dan bagaimana keduanya memberikan dampak signifikan pada perkembangan politiknya di Timur Tengah, walaupun tidak jarang menyebabkan konflik yang bereskalasi. Berkaitan dengan ketegangan hubungan kedua negara, bukan hanya soal konflik yang dapat menyimpulkan tolak ukur eskalasi, melainkan lebih jauh dari itu. Sunni dan Syi'ah adalah dua Aqidah yang berbeda secara mendalam. Persimpangan kedua sekte ini terletak pada pemahaman tentang Khalifah, dan praktek shalat 5 waktu, dimana hal tersebut merupakan wilayah krusial dan tidak dapat ditolerir.

Khalifah diterjemahkan sebagai seorang pemimpin umat muslim seluruh dunia. Kedua aliran ini menyepakati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Khalifah pertama bagi umat islam. Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, khalifah umat islam diganti oleh sahabat Nabi, diantaranya, Abu Bakar Shiddiq, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Bagi orang Syi'ah kepemimpinan 3 sahabat Nabi sebelum Ali Bin Abi Thalib (Abu Bakar Shiddiq, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan) tidak diakui secara de facto. Sebaliknya, bagi islam Sunni mengakui keempat kepemimpinan sahabat Nabi Muhammad SAW. Disamping itu perkara lain yang menjadi perbedaan antara Sunni dan

Syi'ah adalah terkait shalat 5 waktu, dimana Sunni menerapkan shalat 5 waktu, sementara Syi'ah hanya 3 waktu (Mulyono, 2012).

Krisis yang terjadi Timur Tengah telah melibatkan banyak negara, baik secara langsung dan tidak langsung membentuk arah kebijakan masing – masing negara yang terlibat. Tidak sedikit arah kebijakan – kebijakan negara tersebut menyebabkan eskalasi konflik di kawasan, menuntut mereka ke dalam konflik yang tidak berkesudahan. Meskipun sebuah konflik dan ketegangan dapat diredam, namun tidak menutup kemungkinan gejala – gejala yang sama bisa muncul kembali. Seperti yang dialami oleh ketiga negara tersebut, yaitu Arab Saudi, Iran dan Qatar. Dimana hubungan antara satu dengan yang lainnya tidak harmonis, terutama dalam konteks ini adalah hubungan Arab Saudi dengan Qatar serta Arab Saudi dengan Iran. Sebagaimana telah dipaparkan pada bab 2 bahwa Arab Saudi dan Qatar secara historis memang memang memiliki ketegangan hubungan yang cukup signifikan. Sementara Qatar sebagai saudara dekatnya, justru memiliki hubungan yang lebih harmonis dengan musuh terbesar hegemoninya, yakni Iran.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Rangkuman

Setelah melihat lebih jauh ke dalam analisa pada bab 3, penulis melihat ada 2 faktor yang mendorong Arab Saudi mengambil tindakan pemutusan diplomatik dengan Qatar, yakni faktor eksternal dan internal. Adapun faktor internalnya adanya aliran yang berbeda antara Saudi dan Qatar, dimana Saudi berafiliasi dengan *salafi* atau *wahabi* sementara Qatar berafiliasi dengan *Ikhwanul Muslimin* yang notabeneanya adalah islam modern. Sementara faktor eksternalnya Araba Saudi merasa tidak aman dengan kehadiran Qatar yang cukup mencolok di kawasan timur tengah. Qatar juga muncul dengan prestasi yang cukup baik dengan kebijakan luar negerinya, yakni aktif menjadi mediator.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 dan anlisa bab 3, kedua negara mengalami hubungan yang fluktuatif, mulai dari usaha kudeta tahun 1996, perjanjian Riyadh 2013 – 2014, dan puncaknya adalah pemutusan diplomatik tahun 2017 yang diikuti beberapa anggota GCC yang sama – sama pernah memiliki isu dengan Qatar, seperti UAE, Bahrain dan Mesir. Dan beberapa tuntutan yang diajukan kepada Qatar juga dinilai bersebrangan dengan nilai-nilai seperti kebebasan pers dan Hukum Internasional, serta tuduhan dan klaim sepihak oleh oposisi terkait *Ikhwanul Muslimin* adalah teroris, sementara PBB tidak menganggap demikian.

Jika kita kembali kepada perspektif Realisme, ini cukup masuk akal, namun sangat kompleks dan sistematis. Kekhawatiran Arab Saudi dengan Qatar

sudah ada sejak kerjasamanya dengan Iran dalam pengelolaan migas di Teluk Persia. Begitupun pasca *Arab Spring*, Arab Saudi menunjukkan perubahan sikap terhadap saudaranya sendiri ini disebabkan perbedaan sudut pandang antara Islam Moderat atau Konservatif. Disisi lain, mengetahui Iran semakin kuat sejak program nuklirnya disorot oleh dunia, Arab Saudi memilih kerjasama dengan Amerika Serikat pasca 911, dalam bidang militer khususnya. Karena sama – sama tidak menyukai Iran, dan ingin bersatu dalam rangka melawan terorisme “war on terror” **katanya**, yang sampai hari ini masih menjadi pertanyaan juga bagi penulis.

Revolusi Tunisia, Mesir, Suriah, Yaman, Libya, Palestina adalah bukti kepanjangan tangan para **Aktor** Internasional, sebagai pihak yang ingin mencapai kepentingan – kepentingan mereka, sekalipun dunia telah memiliki Organisasi Internasional, Lembaga Hukum Internasional, pada kenyataannya, negara – negara ini tetap saja menciptakan **konflik** dan terus berlangsung hingga hari ini. Menumpahkan darah, merenggut nyawa – nyawa tak berdosa (**Moral**). Bagi mereka, kekuasaan dan kepentingan adalah yang paling utama. Begitupun sebagai negara yang *superpower* Arab Saudi kurang mengindahkan Hukum Internasional, terkait kebebasan pers dan tuduhan sepihak (**Anarki**).

Pencerahaan lain yang penulis temukan adalah bahwa Qatar tidak terlalu khawatir dengan keputusan diplomatik ini walaupun pada awalnya memiliki dampak – dampak tertentu. Namun, ekonomi akan tetap ekonomi, artinya di era modern seperti saat ini, dunia internasional tidak sedemikian buta untuk kemudian ikut menjauhi Qatar karena “dituduh” mendukung terorisme, disisi lain Qatar juga memiliki cadangan minyak yang besar, dan dunia internasional sadar bahwa

mereka membutuhkan itu. Dengan pemutusan diplomatik yang dilakukan oleh negara-negara tersebut justru membuat Qatar menjadi pusat perhatian dunia, pasalnya selain sebagai negara yang kecil tetapi Qatar adalah salah satu negara Islam yang kaya, buktinya, Iran dan Turki turut membantu pasca blokade dijalankan oleh oposisi.

Dan terlepas dari segala fenomena yang terjadi, penulis melihat bahwa *Ikhwanul Muslimin*, *Yusuf Al Qaradawi*, *Aljazeera* memang lahir di waktu yang tepat bagi Qatar untuk mulai berani mengambil tindakan dan muncul ke permukaan, bahkan didukung dengan finansial yang juga tepat waktu pada saat itu, penemuan migas di teluk persia. Sehingga kondisi ini membuat Qatar berada posisi selain Aman juga dipertimbangkan bagi negara – negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljazeera. (2006, 11 1). *The Opposite Direction*. Retrieved from www.aljazeera.com.
- Aljazeera. (2016, 1 4). *Saudi Arabia cuts diplomatic ties with Iran*. Retrieved from www.aljazeera.com.
- Aljazeera. (2017, 5 12). *Arab states issue 13 demands to end Qatar-Gulf crisis*. Retrieved from www.aljazeera.com.
- Aljazeera. (2017, 7 3). *Gulf crisis: Qatar FM in Kuwait to respond to demands*. Retrieved from www.aljazeera.com:
<https://www.aljazeera.com/news/2017/7/3/gulf-crisis-qatar-fm-in-kuwait-to-respond-to-demands>
- Aljazeera. (2017, 12 4). *What is the GCC?* Retrieved 5 16, 2020, from www.aljazeera.com: <https://www.aljazeera.com/news/2017/12/4/what-is-the-gcc>
- Aljazeera. (2017, 6 18). *What is the Muslim Brotherhood?* Retrieved from www.aljazeera.com: <https://www.aljazeera.com/features/2017/6/18/what-is-the-muslim-brotherhood>
- Aljazeera. (2017, 7 5). *Qatar diplomatic crisis: How it affects air travel*. Retrieved from www.aljazeera.com
- Aljazeera. (2018, 7 4). *Qatar state news agency's hacking linked to Riyadh*. Retrieved from www.aljazeera.com
- Aljazeera. (2018, 3 4). *New Details revealed on 1996 Coup attempt against Qatar*. Retrieved from www.aljazeera.com
- Aramco. (2021). *The Birth of Arabian Oil*. Retrieved from www.aramco.com.
- Azran, T. S. (2013). Aljazeera, Qatar and New Tactics in State-Sponsored Media Diplomacy. *American Behavioral Scientist*, 1297.

- BBC. (2017, 6 3). *Qatar is given a further 48 hours to meet Gulf demands*. Retrieved from www.bbc.com
- BBC. (2017, 6 5). *Tujuh negara Arab putuskan hubungan diplomatik: Ada apa dengan Qatar?* Retrieved from www.bbc.com.
- Blanchard, C. M. (2020). *Saudi Arabia: Background and U.S Relations*. Congressional Research Service.
- Conan, N. (2008, 6 4). *Al-Jazeera English Struggles for U.S. Airtime*. Retrieved from www.npr.com.
- Counterextremism. (2021). *Muslim Brotherhood in Qatar*. Retrieved from www.counterextremism.com:
<https://www.counterextremism.com/content/muslim-brotherhood-qatar>
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.
- DW. (2016, 1 5). *Siapa Nimr al Nimr, yang Menyulut Konflik Iran dan Arab Saudi?* Retrieved from www.dw.com: <https://www.dw.com/id/siapa-nimr-al-nimr-yang-menyulut-konflik-iran-dan-arab-saudi/a-18958741>
- Fadel, L. (2016, 1 4). *Who Was The Shiite Sheikh Executed By Saudi Arabia?* Retrieved from www.npr.org.
- Fahham, K. (2014). *Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya*. *Politica Vol.5 No.1*, 44.
- Galeeva, D. (2018, 4 9). *The Gulf Cooperation Council (GCC): A Comprehensive View*. Retrieved from <https://mesbar.org>.
- Gordon, Y. H. (2017). *The Qatar Crisis: Causes, Implications, Risks, and the Need for Compromise*. *The Institute for National Security Studies*, 1-6.
- Green, J. (2007, February). *A Guide To Using Qualitative Research Methodology*. London, UK, London: Medecins Sans Frontieres.

- Harb, I. K. (2017). Crisis In The Gulf Cooperation Council. *Arab Center Washington DC*, 13-14.
- Haretz. (2017, 6 7). *The Qatar-Iran Gas Field Behind the Diplomatic War in the Middle East*. Retrieved from www.haaretz.com.
- Helman, C. (2009, 6 20). *Will Americans Tune To Al Jazeera?* Retrieved from www.forbes.com.
- Hijjawi, A. (2011). The Role of Aljazeera (Arabic) in the Arab Revolts of 2011.
- Holsti, K. (1983). International Politics. In M. T. Azhary, *Politik Internasional* (p. 16). Jakarta: Erlangga.
- Hutapea, R. U. (2017, 1 7). *Qatar Juga Tarik Duta Besarnya dari Iran Usai Penyerangan Kedutaan Saudi*. Retrieved from www.detik.com
- Johnston, D. L. (2014). Yusuf al-Qaradawi's Purposive Fiqh: Promoting or Demoting the Future Role of the Ulama? In D. L. Johnston, *Maqasid al-Shariah and Contemporary Reformist Muslim Thought* (pp. 39-40). palgrave macmillan.
- Jones, M. (2018). The Escalating Conflict with Hezbollah in Syria. *Center For Strategic & International Studies*, 2.
- Kamrava, M. (2017). Iran-Qatar Relation. In A. E. Gawdat Bahgat, *Security and Bilateral Issues between Iran and its Arab Neighbours* (pp. 174 - 181). Doha: G. Bahgat.
- Kausch, K. (2015). Geopolitic and Democracy in the Middle East. *A European Think Tank for Globali Action*, 63.
- Keatinge, T. (2017, 13 June). *Why Qatar is the focus of terrorism claims*. Retrieved from www.bbc.com: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40246734>
- Kharroub, T. (2017). Crisis In The Gulf Cooperation Council. *Arab Center Washington, DC*, 52-54.

- Mark Mazzeti, M. A. (2016, 1 23). *U.S. Relies Heavily on Saudi Money to Support Syrian Rebels*. Retrieved from www.nytimes.com.
- Moussaoui, E. (2014, 1 24). *DW*. Retrieved from www.dw.com:
<https://www.dw.com/id/kepentingan-arab-saudi-dalam-perang-suriah>
- Mulyono, S. (2012). Pergerakan Teologi Syiah-Sunni, Membedah Potensi Integrasi dan Disintegrasi. *Jurnal Studi Keislaman*, 247-276.
- Nawawy, P. (2008). *Mediating Conflict Al-Jazeera English and the Possibility of a Conciliatory Media*. Los Angeles: FIGUEROA PRESS.
- Rice, X. (2008, 12 2). *Qatar looks to grow food in Kenya*. Retrieved from www.theguardian.com:
<https://www.theguardian.com/environment/2008/dec/02/land-for-food-qatar-kenya>
- Rosmaladewi. (2015). Pemikiran Politik Hasan Al Banna. *Nurani Vol. 15*, 75-86.
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Ryan, Y. (2011, 1 20). *The tragic life of a street vendor*. Retrieved from www.aljazeera.com.
- Sadig, H. B. (2019). *Aljazeera in the Gulf and in the World*. Doha: Palgrave Macmillan.
- Sakila, I. F. (2016). Peran Al-Jazeera dalam Transformasi Politik Tunisia Pada Peristiwa Arab Spring 2010-2011. 6,65 & 86-89.
- Saudiembassy. (2021). *The Embassy of Saudi Arabia Washington, DC*. Retrieved from www.saudi.embassy.net.
- Sharif, O. A. (2015, 3 3). *Unprecedented rift splits Jordan's Muslim Brotherhood*. Retrieved from www.al-monitor.com.
- Taylor, A. (2017, 6 5). *Qatar Could Face A Food Crisis In Spat With Arab Neighbors*. Retrieved from www.washingtonpost.com:

<https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/06/05/qatar-could-face-a-food-crisis-in-spat-with-arab-neighbors/>

Thepeninsulaqatar. (2018, 12 17). *Aljazeera reveals Saudi-UAE hand in 1996 Qatar coup plot*. Retrieved from www.thepenisulaqatar.com

Ulrichsen, K. C. (2014). Policy Drivers and Regional Implication. *Cariniege Endowment For International Peace*.

Wardoyo, B. (2018). Rivalitas Saudi-Qatar dan Skenario Krisis Teluk. *Jurnal Hubungan Internasional*, 81-90.

Whitaker, B. (2011, 9 20). *Al-Jazeera – how Arabic news channel became a key player in global media*. Retrieved from www.theguardian.com.

Winter, C. (2017, 11 26). *Saudi-led Islamic military alliance: counterterrorism or counter Iran?* Retrieved from www.dw.com.

Wintour, P. (2017, 5 Monday). *The Guradian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2017/jun/05/saudi-arabia-and-bahrain-break-diplomatic-ties-with-qatar-over-terrorism>

Yehia, A. J. (2011, 12). *The Framing Of The Egyptian Revolution Potrayed Through The Aljazeera And Cnn Media Outlets And How They Compare And Contrast*. 26-32 & 91. Missiouri, United States of America.

Ziadeh, R. (2017). Crisi In The Gulf Cooperation Council. *Arab Washington Center*, 31.

Zulfikar, M. (2014, 3 8). *Why did the Gulf states withdraw their ambassadors from Qatar*. Retrieved from www.middleeastmonitor.com